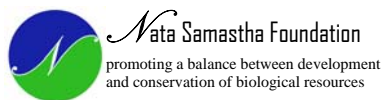


**REVIEW OF PAST JAPANESE ASSISTANCE
IN FORESTRY SECTOR (REVISI)**
*KAJIAN BANTUAN JEPANG MASA LALU
DALAM BIDANG KEHUTANAN (REVISI)*

Volume I:
LAPORAN UTAMA

*N*aHa Foundation



AUGUST 2011

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ACIAR	Australian Centre for International Agricultural research
ASEAN	Association of South East Asia Nations
BAPI	Biodiversity Action Plan for Indonesia
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional; National Development Planning Agency
BBPBTH	Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
BPHM	Badan Pengelola Hutan Mangrove
BCP	Biodiversity Conservation Project
BIC	Biodiversity Information Center
BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CBD	Convention on Biological Diversity
CFBTI	Center for Forest Biotechnology and Tree Improvement
CMBRC	Project on Improvement of Collection Management and Biodiversity Research Capacity of the Research Center for Biology
CSIRO	Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
DAS	Daerah Aliran Sungai
Dephut	Departemen Kehutanan
DG	Directorate General
DNA	Deoxyribo Nucleic Acid
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat, People's Parliament Assembly
FFPMP	Forest Fire Prevention and Management Project
FMU	Forest Management Unit
FORDA	Forestry Development Agency
GEF	Global Environment Facility
GHSNP	Gunung Halimun-Salak National Park
GNP	Gross National Product
GoI	Government of Indonesia
GoJ	Government of Japan
HTI	Hutan Tanaman Industri
IBF	Indonesian Biodiversity Foundation
IBSAP	Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan
IDR	Indonesian Rupiah
IPGRI	International Plant Genetic Resources Institute
JPY	Japanese Yen
JICA	Japan International Cooperation Agency
Kemhut	Kementerian Kehutanan
KLN	Pusat Kerjasama Luar Negeri; Foreign Cooperation
KOFFCO	Komatsu-FORDA Fog Cooling System
KOICA	Korean International Cooperation Agency

LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Indonesian Institute of Sciences
Litbang	Penelitian dan Pengembangan
MIC	Mangrove Information Center
MoF	Ministry of Forestry
MPA	Masyarakat Peduli Api (People Care for Fire)
MTA	Material Transfer Agreement
NBIN	National Biodiversity Information Network
NCIC	Nature Conservation Information Center
NGO	Non Governmental Organization
NP	National Park
NTFP	Non Timber Forest Product
NTT	Nusa Tenggara Timur
ODA	Overseas Development Agency
PDM	Project Development Matrix
Ph.D	Doctor of Philosophy
PIKA	Pusat Informasi Konservasi Alam (NCIC)
PIM	Pusat Informasi Mangrove
PHKA	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; Forest Protection and Nature Conservation
PHPL	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Sustainable Production Forest Management
PU	Pekerjaan Umum (Departemen Pekerjaan Umum); Ministry of Public Works
PUSREHUT	Pusat Rehabilitasi Hutan Hujan Tropika, Tropical Rain Forest Research Center
RCB	Research Center for Biology
REDD	Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
Renstra K-L	Rencana Strategis Kementerian-Lembaga; Strategic Plan for Ministries and Institutions
Renstra	Rencana Strategis; Strategic Plan
REPELITA	Rencana Pembangunan Lima Tahun; Five Year Development Plan
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RLPS	Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah; Medium Term Development Plan
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang; Long Term Development Plan
RRL	Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan
TNGH	Taman Nasional Gunung Halimun
TNGHS	Taman Nasional Gunung Halimun-Salak
ToR	Terms of Reference
UNEP	United Nations Environment Program
US	United States
WKNP	Way Kambas National Park

KATA PENGANTAR

Laporan berjudul “Kajian Bantuan Jepang Masa Lalu dalam Bidang Kehutanan” (“Review of Past Japanese Assistance in Forestry Sector”) ini terdiri dari 4 volume sebagai berikut:

- Volume I: Laporan Utama
- Volume II: Lembar Informasi Proyek-Proyek JICA Masa Lalu
- Volume III: Daftar Dokumen Proyek-Proyek JICA Masa Lalu
- Volume IV: Dokumentasi Kunjungan Lapangan

Volume ini (Volume I) ini merupakan laporan utama. Laporan versi terdahulu sesungguhnya telah dibuat pada bulan Agustus 2010. Setelah memperoleh masukan dan rekomendasi dari Dr. Agus Sarsito (Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan), kami membuat laporan versi revisi ini. Selain itu, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan telah pula diperbaharui pada bulan Desember 2010, sehingga kami juga melakukan penyesuaian terhadap isi laporan.

Teramat banyak teman dan kolega yang memberikan informasi kepada kami melalui wawancara, baik secara langsung maupun melalui telpon. Informasi yang disampaikan oleh narasumber ini sungguh sangat berharga dan pada dasarnya menjadi tulang punggung laporan ini. Daftar narasumber tercantum pada Lampiran 3 dan 4 pada volume ini. Kami sungguh amat berterimakasih atas informasi yang disampaikan oleh narasumber kepada kami dan, terlebih penting lagi, kami menghargai pula kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami.

Penghargaan yang tinggi kami haturkan pula kepada kolega JICA kami: Hiromi Yamauchi, Shigeru Takahara, Irma Imelda, dan Oktovina Trisia Windarti, yang telah membantu kami dalam banyak hal untuk melaksanakan studi ini, menyediakan referensi, dan menyelesaikan laporan ini. Kami berterimakasih pula kepada kolega kami di Pusat Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, khususnya kepada Dr. Agus Sarsito, Dr. Teguh Raharjo, dan Laksmi Banowati. Terimakasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada kolega dan teman yang bersama-sama dengan kami telah menghabiskan masa-masa yang menyenangkan di lapangan: Hiromi Yamauchi, Shigeru Takahara, Oktovina Trisia Windarti, Tri Meinarthin, Ista Kania W., Ferry Yunus.

Kami berharap agar laporan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk JICA dan Kementerian Kehutanan.

Jakarta, 29 Agustus 2011
Yayasan NAHA (Nata Samastha)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR BOKS.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
I. PENDAHULUAN	1
II. PENDEKATAN DAN METODA	3
PEMILIHAN PROYEK YANG DIKAJI	3
METODA	3
DURASI KAJIAN	7
ANALISA	7
III. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN	8
TINJAUAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS KEHUTANAN NASIONAL	8
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN	8
RENCANA NASIONAL LAIN YANG TERKAIT DENGAN BIDANG KEHUTANAN	9
IV. LUARAN PROYEK DAN DAMPAK BANTUAN JEPANG DALAM BIDANG KEHUTANAN	19
PERKEMBANGAN PROYEK	19
LUARAN PROYEK	19
PROYEK JICA DAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI	27
DAMPAK	29
V. RELEVANSI BANTUAN JEPANG DALAM BIDANG KEHUTANAN	31
RELEVANSI PROYEK-PROYEK JICA TERHADAP KEBIJAKAN KEMENTERIAN KEHUTANAN	31
RELEVANSI PROYEK-PROYEK JICA TERHADAP POGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN KEHUTANAN	33
VI. MASA DEPAN BANTUAN JEPANG DALAM BIDANG KEHUTANAN	40
PERAN BANTUAN JEPANG	40
PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK JICA: BEBERAPA FAKTA	41
NICHE PROYEK-PROYEK JICA	45
ARAHAN PROGRAM NASIONAL KEHUTANAN	46
ARAHAN PROGRAM JICA UNTUK MASA MENDATANG	46
VII. PENUTUP.....	48
REFERENSI	49
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar proyek JICA masa lalu yang dikunjungi, disertai alasan pemilihan proyek	6
Tabel 2. Ringkasan luaran proyek JICA masa lampau	20
Tabel 3. Dampak yang dapat diidentifikasi dari hasil kunjungan lapangan ke Yogyakarta, Jambi, Sukabumi dan Cibinong	29
Tabel 4. Dukungan proyek-proyek JICA masa lalu dengan kebijakan Kementerian Kehutanan.....	32
Tabel 5. Relevansi proyek-proyek masa lalu JICA dengan Rencana Strategis 2001-2005	34
Tabel 6. Relevansi proyek-proyek masa lalu JICA dengan Rencana Strategis 2005-2009	35
Tabel 7. Kontribusi proyek-proyek JICA masa lalu terhadap Rencana Strategis yang sedang berjalan.	37
Tabel 8. Peran proyek-proyek bidang kehutanan yang dibantu oleh Pemerintah Jepang	40
Tabel 9. Perbedaan persepsi antara pihak Indonesia dan pihak Jepang dalam melaksanakan proyek-proyek JICA.	41
Tabel 10. Ringkasan fakta yang terungkap berdasarkan wawancara dengan narasumber.	42
Tabel 11. Visi dan misi Kementerian Kehutanan seperti tertuang dalam 'Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2006-2015.	46
Tabel 12. Beberapa saran arahan proyek-proyek JICA masa mendatang.	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka analisa	7
----------------------------------	---

DAFTAR BOKS

Boks 1.	Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Sejak tahun 2001	10
Boks 2.	Rencana Aksi Indonesia yang Terkait dengan Keanekaragaman Hayati	17
Boks 3.	Memadukan Proyek dengan Pengelolaan Taman Nasional: Kasus Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	21
Boks 4.	Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan: Investasi JICA yang Tidak Ternilai untuk Pengembangan Ilmu Kehutanan	24
Boks 5.	Pusat Pelatihan Camp Granit: Menanggapi Tantangan Krisis Kebakaran Hutan	26
Box 6.	Peran JICA dalam Pengembangan Pusat Penelitian Biologi – LIPI	27
Boks 7.	Jalur Hijau Kebakaran Hutan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal: Kasus Sungai Rambut, Jambi	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Daftar proyek-proyek JICA masa lalu dalam bidang kehutanan yang dikaji pada studi ini.....	50
Lampiran 2.	Ringkasan proyek-proyek JICA masa lalu, disusun berdasarkan urutan kronologis	53
Lampiran 3.	Daftar narasumber yang diwawancarai.	57
Lampiran 4.	Daftar narasumber yang diwawancarai selama kunjungan lapangan	58

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bantuan Pemerintah Jepang untuk sektor kehutanan – melalui JICA – kepada Pemerintah Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1970an. Hingga kini JICA telah menyelesaikan 59 proyek yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Tujuan dari studi ini adalah mengidentifikasi luaran (output) dan dampak (outcome) proyek-proyek JICA yang telah dilaksanakan sejak tahun 1970an, agar dapat diidentifikasi luaran dan dampak dari bantuan Jepang ini, serta agar dapat digunakannya hasil-hasil proyek tersebut untuk mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan.

Informasi dihimpun dari mengumpulkan publikasi relevan yang disarikan dalam bentuk Lembar Informasi, mempelajari dokumen Renstra Kementerian Kehutanan, mewawancarai narasumber (total 65 orang staf dari berbagai kantor dan lapangan), serta melakukan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi terpilih (di Provinsi Jawa Barat, Yogyakarta dan Jambi) guna mengkaji luaran dan dampak proyek-proyek JICA yang telah dilaksanakan pada masa lampau.

Berdasarkan jenis bantuannya, proyek-proyek JICA dapat dikategorikan menjadi Kerjasama Teknik (Technical Cooperation; 15 proyek), Studi Pengembangan (Development Study, 12 proyek), Bantuan Hibah (Grant Aid, 10 proyek), Kerjasama Pengembangan (Development Cooperation, 19 proyek), dan Dana Pinjaman (Loan Assistance, 3 proyek). Kementerian Kehutanan telah lama mempunyai kebijakan tidak menerima Dana Pinjaman asing. Ketiga proyek Dana Pinjaman tersebut sesungguhnya diberikan kepada kementerian lainnya, yakni Kementerian Pekerjaan Umum. Namun demikian, ketiga proyek itu juga dimasukkan dalam studi ini karena proyek tersebut berkaitan dengan sektor kehutanan.

Proyek-proyek JICA terdahulu dimulai dengan proyek yang kecil dan spesifik. Selanjutnya, proyek menjadi semakin besar, komprehensif dan terintegrasi. Beberapa proyek yang agak baru berlangsung sangat lama, berlanjut ke fase berikutnya atau berubah menjadi proyek lanjutan yang lebih spesifik. Proyek kebakaran hutan, misalnya, berlangsung selama 13 tahun. Jika dibandingkan dengan bantuan dari negara asing lainnya, bantuan Jepang ternyata lebih dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Faktor yang mempengaruhi penerimaan ini adalah: spirit sesame negara Asia, adanya pemberian bantuan hibah melalui berbagai proyek, dan terjadinya hubungan yang erat antara counterpart Jepang dan Indonesia selama proses kerjasama dan transfer teknologi.

Luaran proyek-proyek JICA ini sangat bervariasi, mulai dari pembangunan sumberdaya manusia (capacity building, transfer teknologi, peningkatan pengetahuan, kesadaran masyarakat), material fisik (konstruksi, bangunan, infrastruktur, peralatan, kendaraan, fasilitas lain), serta sistem dan teknologi (peta, berbagai pengetahuan dan teknologi tentang penanaman, sistem deteksi dini kebakaran hutan, kegiatan terkait sosial-ekonomi). Banyak diantara proyek ini memberikan luaran dan dampak yang sangat baik, yang hingga kini masih dirasakan. Hal ini dibuktikan dan diperkuat dengan hasil kunjungan ke lapangan.

Tidak diragukan lagi bahwa bantuan Jepang melalui JICA memiliki peran yang besar dalam pembangunan sektor kehutanan. Tujuh peran bantuan Jepang dapat ditemukan, yaitu menyediakan (provisioning), mempercepat (catalizing), melengkapi (complementing),

memindahkan (transferring), memicu (triggering), menemukan (innovating), dan meningkatkan (enhancing).

Untuk mengetahui apakah bantuan Jepang selaras dengan kebijakan Kementerian Kehutanan, Renstra Kementerian Kehutanan dipelajari dan digunakan sebagai acuan utama. Dalam Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2011 (revisi) telah dirumuskan 6 kebijakan prioritas dan 18 sasaran strategis, semuanya akan dilaksanakan melalui 8 program dan 59 kegiatan. Dari hasil kajian pencocokan proyek JICA dengan kebijakan serta program dan kegiatan Kementerian Kehutanan dengan menggunakan tabel sederhana, tampak jelas bahwa proyek dan kegiatan JICA memang selaras dengan Renstra Kementerian Kehutanan.

Proyek-proyek JICA yang telah diselesaikan pada masa lampau mendukung kebijakan Kementerian Kehutanan, termasuk kebijakan yang terkait dengan konservasi, rehabilitasi, kebakaran hutan dan pembangunan masyarakat. JICA tampaknya tidak dapat melaksanakan proyek yang terkait dengan kebijakan Kementerian Kehutanan mengenai pembalakan liar (illegal logging) dan pemantapan kawasan hutan. Selain itu, dari hasil kajian mendalam terhadap 9 proyek JICA terungkap bahwa proyek JICA sangat relevan dengan program-program Kementerian Kehutanan sebagai berikut: (a) Program #3 – Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam (b) Program #4 – Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam (c) Program #5 – Pengembangan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (d) Program #7 - Penelitian dan pengembangan, dan (e) Program #8 - Pelatihan kehutanan, (Renstra 2005-2009).

Dari kajian tentang peluang kontribusi proyek JICA masa lalu untuk Renstra saat ini (2010-2014), dapat disimpulkan bahwa proyek JICA dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap: (a) Program #3 - Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, (b) Program #4 - Peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai berbasis pemberdayaan masyarakat, (c) Program #5 – Penelitian dan pengembangan Kementerian Kehutanan, dan (d) Program #8 – Penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku kepentingan terungkap bahwa sesekali masih terdapat perbedaan persepsi antara pihak Jepang dan pihak Indonesia pada waktu pelaksanaan proyek, yang dapat menghambat luaran dan dampak proyek. Perbedaan persepsi ini terkait dengan filosofi keproyekan dan system pendanaan. Untuk masa mendatang disarankan bahwa semua personil yang turut melaksanakan proyek perlu mempersamakan persepsi dan opini sebelum dilaksanakan proyek baru, agar dapat menghilangkan kemungkinan sumber-sumber kesalahpahaman antar kedua belah pihak.

Untuk bantuan Jepang masa yang akan datang, berbagai topik masih terbuka untuk dapat dilaksanakan. Topik yang disarankan antara lain adalah topik terkait perubahan iklim, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi, jasa lingkungan, tatakelola (governance), serta produksi kayu dan efisiensi produksi kayu.

I. PENDAHULUAN

Kemhut selama ini telah berupaya keras untuk mengelola hutan hujan tropis Indonesia seluas 136,88 juta hektar (Kementerian Kehutanan 2010). Menyadari tingginya kepentingan dan manfaat hutan untuk lingkungan global, berbagai bantuan luar negeri (BLN) - termasuk dari Pemerintah Jepang melalui JICA - telah diberikan ke Indonesia untuk mengelola hutan beserta keanekaragaman hayatinya.

Sejak tahun 1970an Pemerintah Jepang telah membantu Pemerintah Indonesia dalam bidang kehutanan. Transfer teknologi, pembangunan gedung-gedung, serta berbagai macam program yang terkait dengan kehutanan dan konservasi keanekaragaman hayati telah dilaksanakan melalui kerjasama dengan Kementerian Kehutanan (Kemhut) Republik Indonesia.

Dalam mengelola hutan, Kemhut telah merumuskan kebijakan untuk memfokuskan pembangunan pada sektor kehutanan. Pada saat ini pembangunan kehutanan di Indonesia dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP, 25 tahun), Rencana Strategis (Renstra, 5 tahun) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT, 1 tahun). Dengan demikian, setiap dana bantuan luar negeri perlu menselaraskan tema, program dan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Kemhut.

Selama empat dekade bantuan JICA di Indonesia, telah dilaksanakan 59 proyek yang terkait dengan kehutanan dan keanekaragaman hayati. Berbagai pengalaman dan pembelajaran dapat ditarik dari proyek-proyek tersebut dan dipergunakan untuk bekal dalam melaksanakan proyek selanjutnya.

Pada studi ini dilakukan kajian tentang proyek-proyek sektor kehutanan yang telah dilaksanakan pada masa lalu, dan yang didanai oleh Pemerintah Jepang melalui JICA. Selain itu, konservasi keanekaragaman hayati (khususnya keanekaragaman hayati di ekosistem hutan) juga dikaji, mengingat bahwa program dan kegiatan pada sektor kehutanan sesungguhnya memiliki keterkaitan erat dengan konservasi keanekaragaman hayati.

Tujuan studi ini secara lebih spesifik adalah:

- (i) mengidentifikasi luaran (output) dan dampak (outcome) dari proyek kehutanan masa lampau di Indonesia yang didanai oleh Pemerintah Jepang;
- (ii) memperjelas peranan dana bantuan Jepang untuk kebijakan kehutanan;
- (iii) mengidentifikasi kemungkinan memanfaatkan hasil proyek untuk implementasi Renstra Kehutanan;
- (iv) memberikan masukan terhadap bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Jepang untuk tahun 2010-2014 dan setelahnya (2015-2020).

Kajian ini dilaksanakan dengan cara mempelajari laporan-laporan yang tersedia yang terkait dengan proyek, membuat Lembar Informasi yang berisi gambaran singkat mengenai masing-masing proyek JICA pada masa lampau, melakukan wawancara dengan nara sumber, melakukan kunjungan lapang, serta melakukan analisa terhadap semua informasi yang diperoleh. Hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat, tidak hanya untuk JICA, namun juga untuk Kemhut senagai lembaga mitra bagi proyek-proyek JICA.

Laporan kajian ini terdiri dari 4 volume sebagai berikut:

- Volume I: Laporan Utama
- Volume II: Lembar Informasi Proyek-Proyek JICA Masa Lalu
- Volume III: Daftar Dokumen JICA Masa Lalu
- Volume IV: Dokumentasi Kunjungan Lapangan

II. PENDEKATAN DAN METODA

PEMILIHAN PROYEK YANG DIKAJI

Proyek yang dikaji pada studi ini adalah proyek masa lampau yang dilakukan oleh JICA dan terkait dengan kehutanan dan keanekaragaman hayati. Proyek yang sedang berjalan tidak termasuk dalam bahan kajian. Jumlah proyek yang dikaji adalah 59 proyek (daftar proyek yang dikaji dapat dilihat pada Apendiks 1 dan 2). Proyek-proyek yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan dianggap satu proyek. Namun demikian, jika nama proyek tersebut diganti, maka proyek itu akan dicatat sebagai proyek yang berbeda meskipun proyek tersebut mungkin merupakan kelanjutan dari proyek sebelumnya dan mungkin saja dilaksanakan pada lokasi yang sama.

Berdasarkan skema pendanaan, proyek-proyek tersebut dikelompokkan dalam Kerjasama Teknik (Technical Cooperation, 15 proyek), Studi Pengembangan (Development Study, 12 proyek), Bantuan Hibah (Grant Aid, 10 proyek), Dana Pinjaman (Loan Assistant, 3 proyek), dan Kerjasama Pengembangan (Development Cooperation, 19 proyek)¹. Dari proyek-proyek ini, terhadap 9 proyek (dari 59 proyek) dilakukan kajian yang lebih mendalam, mengingat tingginya kemungkinan bahwa luaran dari proyek-proyek ini dapat memberikan kontribusi terhadap implementasi Renstra Kehutanan dan kemitraan JICA dan Kemhut pada masa mendatang.

METODA

1. Pembuatan Lembar Informasi

Lembar Informasi dibuat untuk memberikan informasi tentang masing-masing proyek JICA yang dilaksanakan pada masa lampau. Lembar Informasi ini berisi data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai laporan JICA. Informasi tambahan lain (misalnya laporan, makalah, situs dunia maya, wawancara) juga ditambahkan jika data dari laporan JICA tidak cukup untuk mengisi Lembar Informasi. Banyak laporan JICA yang ditulis dalam bahasa Jepang, beberapa dilengkapi dengan rangkuman dalam bahasa Inggris. Laporan dalam bahasa Inggris ini juga

¹ Kerjasama Teknik (Technical Cooperation): kerjasama dengan negara mitra dalam melaksanakan suatu kegiatan; Bantuan Hibah (Grant Aid): kerjasama finansial tanpa adanya kewajiban untuk membayar kembali; Dana Pinjaman (Loan Aid): peminjaman modal yang diperlukan oleh suatu negara untuk melakukan pembangunan dengan bunga jangka panjang yang lebih rendah dari pinjaman komersial; Studi Pengembangan (Development Study): penyediaan tim studi untuk mempersiapkan rencana pembangunan sarana publik yang berperan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi pada suatu negara berkembang; Kerjasama Pengembangan (Development Cooperation): program untuk membantu kemandirian pembangunan ekonomi dan sosial di suatu negara berkembang dengan cara menyediakan bantuan teknis dan finansial kepada pemerintah untuk membangun proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta Jepang di negara berkembang tersebut. Sejak bulan Oktober 2008, hanya terdapat 3 skema pendanaan, yakni Kerjasama Teknik, Bantuan Hibah, dan Dana Pinjaman. Sejak awal tahun 1990an, Kemhut tidak menerima Dana Pinjaman dari Bantuan Luar Negeri.
Sumber: JICA (2009).

dipakai untuk memberikan tambahan data pada Lembar Informasi. Laporan yang berbahasa Jepang tidak dipakai karena kendala bahasa.

Informasi tentang setiap proyek (59 proyek) dirumuskan, diringkas dan secara singkat disampaikan pada Lembar Informasi. Setiap Lembar Informasi berisi:

- Informasi proyek secara umum: judul proyek, latar belakang, jenis proyek, sasaran dan tujuan, lembaga yang terkait, lokasi, cakupan wilayah, lamanya proyek, jumlah dana, luaran proyek;
- Lima kriteria standar evaluasi JICA (relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, keberlanjutan²) yang dilaksanakan oleh tim evaluasi;
- Kajian dampak terhadap masyarakat, lingkungan, pembangunan ekonomi, dan organisasi/lembaga (pembangunan, kemitraan antara kedua negara)
- Pembelajaran dan rekomendasi: kebanyakan diambil dari evaluasi lampau yang formal, dilaksanakan oleh JICA. Jika diperlukan, hasil dari kunjungan lapangan juga ditambahkan;
- Informasi lain yang diperlukan: informasi yang mungkin terkait dengan pelaksanaan Renstra Kehutanan dan arahan-arahan program JICA untuk masa mendatang di Indonesia.

Lengkap tidaknya informasi dalam Lembar Informasi tergantung pada ketersediaan laporan-laporan yang berhasil dikumpulkan. Beberapa proyek yang sudah terlalu lama ternyata tidak banyak ditemukan informasi karena tidak adanya laporan. Kumpulan Lembar Informasi ini disajikan pada laporan yang terpisah (Volume II: Lembar Informasi Proyek-Proyek JICA Masa Lalu). Analisa mengenai Lembar Informasi secara umum disajikan dalam laporan ini.

2. Pengumpulan Dokumen

Dokumen yang terkait dengan proyek-proyek JICA masa lalu, termasuk semua dokumen yang dipergunakan untuk menghasilkan Lembar Informasi, juga dikumpulkan. Dokumen lain yang relevan dalam bentuk laporan terbatas, makalah, buku dan beberapa materi tertulis juga dikumpulkan. Semua dokumen yang dikumpulkan disusun dalam wadah khusus dan diberikan kepada perpustakaan Kementerian Kehutanan (Ruang Repository). Daftar dokumen yang dihasilkan dari proyek-proyek JICA, disusun secara alfabetis, disajikan dalam volume yang terpisah (Volume III: Daftar Dokumen Proyek JICA Masa Lalu)

²Relevansi: apakah terdapat keselarasan dan konsistensi antara kepentingan/tujuan proyek (termasuk kesesuaian dan manfaat) dengan kebijakan negara mitra dan kebijakan bantuan Jepang, serta adakah kesesuaian proyek dalam menanggulangi permasalahan dan tantangan pembangunan? Efektivitas: apakah pelaksanaan dan pencapaian tujuan proyek memberikan keuntungan bagi masyarakat dan penerima pemanfaat lainnya? Efisiensi: apakah sumberdaya yang disediakan (input) dapat dimanfaatkan secara efektif, khususnya keterkaitan antara input proyek dan hasil akhirnya? Dampak: apakah tujuan akhir dari proyek ini dapat dicapai, demikian pula dengan dampak jangka panjang dan efek sampingan yang dihasilkan dari pelaksanaan proyek? Keberlanjutan: apakah dampak proyek ini dapat berlanjut secara lestari setelah proyek berakhir?

Sumber: JICA (2009).

3. Kajian tentang Kebijakan Indonesia

Kajian ('desk study') tentang kebijakan yang terkait dengan bidang kehutanan dan konservasi keanekaragaman hayati juga dilaksanakan. Fokus utama dari kajian ini adalah perencanaan Kemhut (rencana jangka panjang, rencana lima tahunan/Rencana Strategis). Rencana Strategis (Renstra) selama tiga periode, yakni 2001-2005, 2005-2009 (Penyempurnaan), dan 2010-2014 dipelajari secara lebih seksama untuk mengkaji apakah proyek-proyek JICA pada masa lalu selaras dengan Renstra Kemhut.

Mengingat bahwa proyek JICA pada masa lampau juga ada kaitannya dengan konservasi keanekaragaman hayati, kebijakan nasional tentang keanekaragaman hayati dipelajari pula. Dokumen yang terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati adalah Biodiversity Action Plan for Indonesia (BAPI) dan Indonesian Biodiversity and Strategy Action Plan (IBSAP).

4. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara dengan narasumber yang relevan, perseorangan dari lembaga mitra, *counterpart*, penerima manfaat (termasuk masyarakat lokal, Kemhut dan para pemangku kepentingan lain) dilaksanakan melalui wawancara secara langsung (tatap muka) atau melalui pembicaraan jarak jauh dengan telpon. Topik wawancara tergantung pada peran atau posisi/jabatan orang yang diwawancarai. Beberapa butir penting yang ditanyakan selama wawancara adalah: peran atau kepentingan proyek, permasalahan dan kendala, hal-hal yang perlu diperbaiki, arahan proyek yang serupa untuk masa mendatang, topik-topik yang baru muncul, Renstra Kemhut, informasi tentang BLN lain, dan peran JICA untuk masa mendatang.

Hasil wawancara dirangkum, dianalisa, disimpulkan, dan dipergunakan pada berbagai bagian dalam laporan ini. Daftar narasumber yang diwawancarai disajikan pada Lampiran 3. Namun demikian, naskah asli dari hasil interview tidak dimasukkan dalam laporan ini untuk menjaga kerahasiaan narasumber.

5. Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan terhadap 9 proyek JICA pada masa lampau dilaksanakan untuk memahami tentang seluk-beluk proyek dan pelaksanaan proyek. Selain itu, salah satu tujuan utama dalam kunjungan lapangan adalah memahami tentang dampak proyek tersebut, beberapa tahun setelah proyek selesai. Lokasi 9 proyek JICA yang dikunjungi terletak di 4 tempat yang berbeda (Tabel 1). Hasil kunjungan lapangan disajikan dalam bentuk boks. Pembelajaran yang diperoleh dipakai pula untuk menganalisa proyek secara umum.

Selama dilakukan kunjungan lapangan, serangkaian wawancara dilaksanakan di lapangan. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh dari wawancara digabungkan dalam naskah dan boks. Daftar narasumber yang diwawancarai di lapangan tertera pada Lampiran 4. Foto-foto yang diambil selama kunjungan lapangan disajikan dalam volume terpisah (Volume IV: Dokumentasi Kunjungan Lapangan).

Tabel 1. Daftar proyek JICA masa lalu yang dikunjungi, disertai alasan pemilihan proyek.

Judul Proyek <i>Lokasi</i>	Alasan Pemilihan Proyek
<ul style="list-style-type: none"> • Gunung Halimun-Salak National Park Management Project <i>Sukabumi</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Contoh bagaimana proyek berbasis penelitian dapat bergulir menjadi proyek berbasis manajemen (proyek ini merupakan keberlanjutan dari Biodiversity Conservation Project) • Merupakan sebuah model bagaimana JICA dapat bekerja dengan taman nasional, khususnya taman nasional yang baru dikukuhkan • Proyek ini mengkaitkan taman nasional di Indonesia dan taman nasional di Jepang dan memicu banyak kegiatan kemitraan lainnya
<ul style="list-style-type: none"> • Biodiversity Conservation Project • Improvement of Research Facilities for Biodiversity Conservation and Utilization • Project on Improvement of Collection Management and Biodiversity Research Capacity of the Research Center for Biology, Indonesian Institute of Sciences in Indonesia <i>Cibinong</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewakili proyek yang rumit dan melibatkan banyak lembaga (LIPI, Taman Nasional Gunung Halimun, PHKA, masyarakat lokal); PDM merupakan gabungan dari banyak komponen, masing-masing komponen terdiri dari berbagai kegiatan • Kebanyakan kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan penelitian lapangan, sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan taman nasional • Melibatkan banyak counterpart (Indonesia dan Jepang) yang berasal dari latar belakang yang berbeda; merupakan contoh yang baik dari proyek yang memiliki kombinasi komponen penelitian ilmiah, pemberdayaan masyarakat lokal, pengelolaan taman nasional, dan pengumpulan data
<ul style="list-style-type: none"> • Forest Tree Improvement Center Construction • Forest Tree Improvement Project <i>Yogyakarta</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan suatu contoh dari dana hibah dan kolaborasi (Kerjasama Teknik) dengan lembaga penelitian di dalam organisasi Kemhut (yaitu Badan Litbang Kehutanan) • Proyek terkait dengan pengadaan alat dan mesin yang canggih, serta memerlukan sumberdaya yang terampil • Gedung dan peralatan yang bernilai tinggi dari proyek ini merupakan contoh yang baik untuk menilai keberlanjutan proyek • Terkait erat dengan pembangunan sumberdaya manusia dan teknologi, dampak kemungkinan lebih besar dari dugaan jika kegiatan setelah berakhirnya proyek (oleh Kemhut) dapat dikelola dengan baik

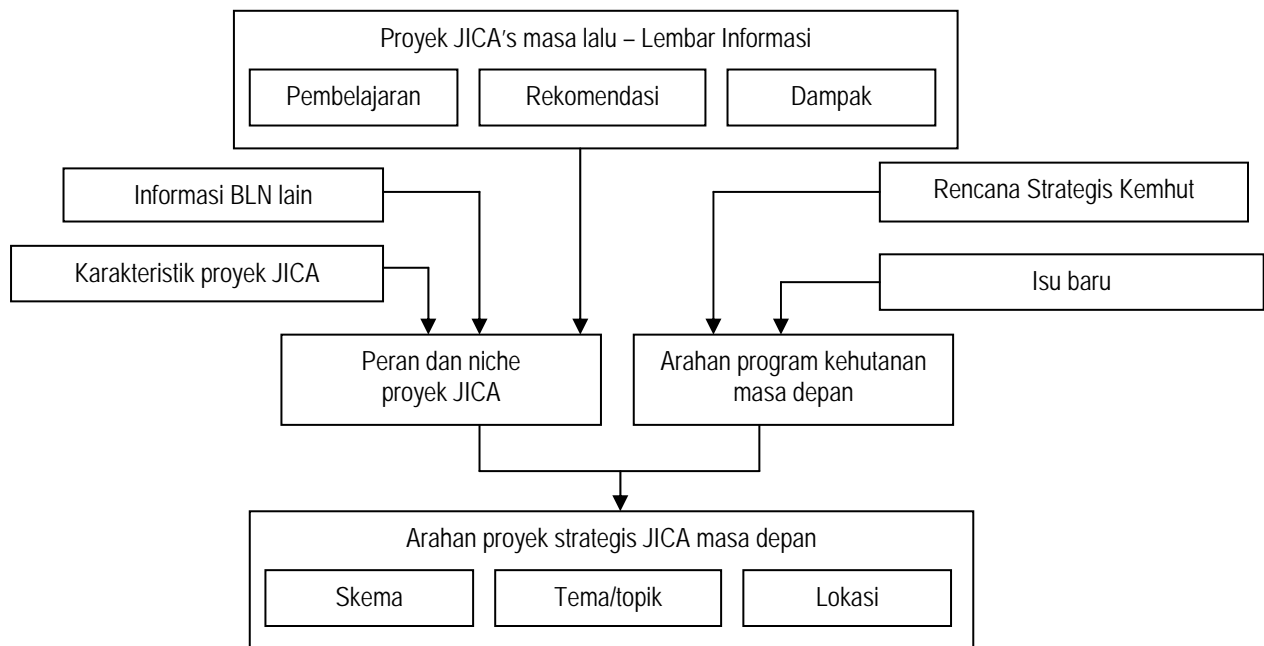
Judul Proyek <i>Lokasi</i>	Alasan Pemilihan Proyek
<ul style="list-style-type: none"> • Forest Fire Prevention Management Project • Improvement of Forest Fire Equipment • The Forest Fire Prevention by Initiative Forest Area Buffer Zone People Project <i>Jambi; Taman Nasional Berbak (Jambi)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek jangka panjang yang menangani masalah nasional dan internasional yang penting pada saat itu • Kegiatan masih berlangsung walau proyek sudah selesai; melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah setempat • Proyek ini memicu kegiatan lain (misal Manggala Agni yang merupakan unit baru pada Kemhut) • Terkait dengan pengadaan peralatan pemadam kebakaran yang memiliki spesifikasi tertentu

DURASI KAJIAN

Kajian ini dilaksanakan dalam waktu 3 bulan, mulai pertengahan Juli dan berakhir pada pertengahan Oktober. Mengingat adanya bulan puasa dan libur Idul Fitri, kunjungan lapangan dilaksanakan selama 2 minggu (minggu ketiga dari bulan September hingga minggu pertama bulan Oktober), pada saat proyek hampir berakhir.

ANALISA

Semua informasi yang diperoleh dianalisa berdasarkan framework of analysis tertera pada Gambar 1. Kebijakan JICA yang terkait dengan sektor kehutanan (kebijakan yang telah ada dan kebijakan pada masa mendatang) tidak dimasukkan dalam analisis ini.



Gambar 1. Kerangka analisa

III. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN

TINJAUAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS KEHUTANAN NASIONAL

Selama beberapa dekade terakhir, proses untuk merumuskan Rencana Strategis (Renstra) pada Kemhut telah berlangsung melalui beberapa tahapan. Renstra Kemhut telah dirumuskan sejak tahun 2001. Sebelum tahun 2001, perencanaan pembangunan kehutanan didokumentasikan dalam REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang disusun oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Pada sistem REPELITA (REPELITA I sampai VI, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto), kehutanan tidak dikategorikan dalam sektor tersendiri, melainkan dimasukkan dalam sektor Pertanian dan Irigasi (pada REPELITA I sampai V, 1969/70 - 1973/74 hingga 1989/90 -1994/95) atau dalam sektor Pertanian dan Kehutanan (REPELITA VI, 1994/95 - 1998/99).

Setelah berakhirnya era pemerintahan Presiden Soeharto, era baru yang disebut Periode Reformasi dimulai pada tahun 1998. Pada periode ini tidak terdapat lagi sistem REPELITA. Kepemerintahan telah berganti selama tiga kali. Sistem pembangunan oleh Kementerian (atau Departemen) di Indonesia juga berubah, bersamaan dengan diperkenalkannya pendekatan perencanaan strategis secara global.

Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Nasional tentang Perencanaan Pembangunan (Departemen Kehutanan 2004). Sesuai dengan ketentuan undang-undang baru ini, semua Kementerian (termasuk Kemhut) wajib membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP; 20 tahun) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM; 5 tahun). RPJM untuk Kementerian dan Lembaga, lebih dikenal sebagai Rencana Strategis (Renstra; dikenal pula sebagai Renstra K-L atau Renstra Kementerian/Lembaga). Selanjutnya setiap Eselon I dalam ruang lingkup Kemhut membuat Renstra yang lebih rinci berdasarkan Renstra untuk lingkup Kemhut.

Dokumen Renstra merupakan dokumen yang penting karena dokumen ini menjadi dasar untuk membuat Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang dikenal dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Rencana anggaran tahunan ditentukan berdasarkan kegiatan yang tertera dalam RKP, setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN

Sesuai dengan mandat yang diberikan melalui Undang-Undang No. 25/2004, Kemhut telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan tahun 2006-2025, yang memberikan arahan-arahan untuk membuat rencana pembangunan lima tahunan (Renstra). Renstra Kemhut pertama kali dibuat tahun 2001 (lihat Boks 1). Namun demikian, dokumen Renstra 2001-2005 secara spesifik belum memberikan daftar kegiatan dan hanya memberikan daftar program saja. Setelah UU 25/2004 diterbitkan, Kemhut mulai membuat Renstra 2005-2009 berdasarkan arahan pada undang-undang tersebut. Pada tahun 2006, tahun kedua setelah dilaksanakannya Renstra 2005-2009, kemhut melakukan revisi renstra karena sektor kehutanan (dan sektor-sektor lain) mengalami kesulitan karena adanya situasi global pada waktu itu, termasuk kenaikan harga minyak secara mendadak, terdapatnya inflasi,

fluktuasi nilai tukar uang. Selain itu, kesenjangan ekonomi di beberapa wilayah dan kekurangan dana karena adanya bencana alam juga mempengaruhi pencapaian target (Ministry of Forestry 2006). Renstra 2005-2009 yang digunakan pada laporan ini adalah dokumen Renstra yang telah mengalami penyempurnaan (revisi). Berbeda dengan Renstra sebelumnya, kegiatan utama (jumlah total 42) telah disusun dibawah masing-masing Program.

Renstra Kemhut selanjutnya adalah Renstra 2010-2014, versi awal ditandatangani oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 27 Januari 2010. Pada Renstra ini dirumuskan 8 kebijakan prioritas, 17 sasaran strategis, 7 program dan 49 kegiatan utama. Mengingat adanya perubahan organisasi internal dalam Kementerian Kehutanan dalam rangka menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada pembangunan negara, Kementerian Kehutanan membuat revisi Rencana Strategis 2010-2014. Rencana Strategis yang baru dan direvisi tersebut diluncurkan pada tanggal 31 Desember 2010 dan di dalamnya memuat antara lain 6 kebijakan prioritas, 18 sasaran strategis, 8 program dan 59 kegiatan utama.

Renstra versi terbaru ini dipergunakan untuk mengkaji proyek-proyek JICA masa lalu, dalam rangka untuk: (a) menganalisa kemungkinan menggunakan hasil proyek JICA untuk pembangunan kehutanan yang dilaksanakan selama Renstra sebelumnya dan untuk Renstra yang akan datang, serta (b) memberikan saran terhadap proyek JICA masa mendatang pada sektor kehutanan.

RENCANA NASIONAL LAIN YANG TERKAIT DENGAN BIDANG KEHUTANAN

Bidang/sektor kehutanan berkaitan erat dengan keanekaragaman hayati, mengingat bahwa keanekaragaman hayati Indonesia banyak dijumpai di hutan-hutan Indonesia. Pada tahun 1993 Pemerintah Indonesia - melalui koordinasi Bappenas - menerbitkan dokumen Biodiversity Action Plan for Indonesia (BAPI). Penerbitan BAPI ini merupakan langkah strategis dalam rangka meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity; CBD).

Dokumen BAPI diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas dan investasi dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati pada REPELITA keenam dan seterusnya. Namun pada pelaksanaannya peran BAPI sebagai acuan untuk para penentu kebijakan belum dapat berlangsung secara optimal. Oleh karenanya, pada tahun 2003 Pemerintah Indonesia memperbaharui dokumen perencanaan, yakni melalui dokumen berjudul Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020 (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2003-2020; IBSAP). Pada Boks 2 disajikan garis besar isi BAPI dan IBSAP. Dapat dicermati dalam boks tersebut bahwa *logical framework* kedua dokumen tersebut sedikit berbeda.

Proyek-proyek JICA, khususnya proyek yang terkait dengan keanekaragaman hayati telah dirancang sedemikian rupa sehingga selaras dengan IBSAP atau BAPI. Lembaga pemerintah lain, yakni LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), telah turut serta melaksanakan proyek-proyek terkait dengan keanekaragaman hayati (beberapa proyek didanai oleh JICA dan dibahas dalam laporan ini). Pengelolaan dan konservasi keanekaragaman hayati merupakan bagian dari sektor kehutanan, sehingga dimasukkan pula dalam laporan ini.

BOX 1. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN SEJAK TAHUN 2001.		
STRATEGIC PLAN 2001-2005		
RENCANA STRATEGIS 2001-2005	Visi	Terwujudnya kelestarian hutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin keberadaan hutan 2. Mengoptimalkan manfaat hutan 3. Memperkuat kelembagaan kehutanan
	Kebijakan Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberantasan penebangan liar 2. Penanggulangan kebakaran hutan 3. Restrukturisasi sektor kehutanan 4. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan 5. Desentralisasi sektor kehutanan
	Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan kawasan hutan 2. Perlindungan dan pengamanan hutan 3. Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya hutan 4. Pengembangan pengelolaan hutan lestari 5. Pengembangan kelembagaan kehutanan
RENCANA STRATEGIS 2005-2009 (PENYEMPURNAAN)		
RENCANA STRATEGIS 2005-2009	Visi	Terwujudnya penyelenggaraan kehutanan untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat
	Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional 2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari 3. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) 4. Mendorong peran serta masyarakat 5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah
	Kebijakan Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal 2. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan 3. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan 5. Pemantapan kawasan hutan

RENCANA STRATEGIS 2005-2009 (PENYEMPURNAAN)	Prioritas Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang didukung oleh stakeholders dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pelestarian sumber daya hutan 2. Pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal 3. Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari antara lain dengan membangun minimal satu unit pegelolaan hutan di setiap provinsi 4. Penambahan pembangunan hutan tanaman sehingga mencapai seluas 5 juta ha dan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 5 juta ha 5. Pembentukan 20 unit Taman Nasional model 6. Revitalisasi dan pengembangan hutan rakyat terutama di luar pulau Jawa 7. Revitalisasi 282 DAS prioritas agar berfungsi secara optimal 8. Pengembangan aneka usaha kehutanan non kayu dan jasa lingkungan secara komersial 9. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 3–10% dan pendapatan masyarakat didalam dan sekitar hutan sebesar 3-4 % 10. Pengukuhan kawasan hutan seluas 12 juta ha
	Program	<p><i>Program Utama:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pemantapan keamanan dalam negeri 2. Program pemantapan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 3. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam 4. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam 5. Program pengembangan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 6. Program peningkatan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup <p><i>Program Penunjang:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Penelitian dan pengembangan 8. Pelatihan kehutanan 9. Tatakelola (governance)
	Kegiatan Utama*	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pemantapan keamanan dalam negeri <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengamanan kawasan hutan (10)** 2. Program pemantapan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pengukuhan kawasan hutan (3) 2.2. Penyiapan dan evaluasi penggunaan dan perubahan kawasan hutan (4) 2.3. Pengelolaan hutan produksi alam yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan (5) 2.4. Pengembangan hutan tanaman (6) 2.5. Pengelolaan (pemanfaatan) hutan produksi alam (7) 2.6. Restrukturisasi industri primer (8) 2.7. Penertiban tata usana hasil hutan (9)

		<p>2.8. Penyusunan rencana kehutanan (16)</p> <p>2.9. Pembangunan KPH (17)</p> <p>2.10. Pengembangan manfaatn HHBK (28)</p> <p>2.11. Pengembangan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi (29)</p> <p>3. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam</p> <p>3.1. Pengelolaan taman nasional (12)</p> <p>3.2. Pengelolaan KSA/PKA/TB (13)</p> <p>3.3. Pengendalian kebakaran hutan (14)</p> <p>3.4. Pengelolaan keanekaragaman hayati (15)</p> <p>3.5. Pengelolaan hutan lindung (18)</p> <p>3.6. Pemanfaatan produk TSL dan jasa lingkungan (19)</p> <p>4. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam</p> <p>4.1. Pengembangan perbenihan (11)</p> <p>4.2. Pengelolaan DAS (25)</p> <p>4.3. Rehabilitasi hutan dan lahan (26)</p> <p>4.4. Pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman (27)</p> <p>4.5. Pengembangan RHL swadaya (30)</p> <p>5. Program pengembangan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup</p> <p>5.1. Inventarisasi dan perpetaan sumberdaya hutan (1)</p> <p>5.2. Pengembangan hutan kemasyarakatan (31)</p> <p>6. Program pengembangan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup</p> <p>6.1. Pengembangan system informasi assessment pembangunan kehutanan (2)</p> <p>7. Penelitian dan pengembangan</p> <p>7.1. Penelitian dan pengembangan kehutanan (20)</p> <p>7.2. Sistem penunjang kelitbang dan penerapan hasil litbang kehutanan (21)</p> <p>8. Pelatihan kehutanan</p> <p>8.1. Pengembangan diklat kehutanan (22)</p> <p>9. Tatakelola (governance)</p> <p>9.1. Pengembangan penyuluhan kehutanan (23)</p> <p>9.2. Standarisasi produk dan jasa kehutanan (24)</p> <p>9.3. Pembinaan hukum dan peraturan perundangan (32)</p> <p>9.4. Desentralisasi kehutanan (33)</p> <p>9.5. Pengembangan rencana dan penganggaran pembangunan kehutanan (34)</p> <p>9.6. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kehutanan regional (35)</p> <p>9.7. Pengembangan pengelolaan keuangan (36)</p> <p>9.8. Pengembangan urusan umum (37)</p> <p>9.9. Pengembangan informasi kehutanan (38)</p>
--	--	--

		<p>9.10. Pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan (39)</p> <p>9.11. Pengembangan kerjasama internasional dan perjanjian global bidang kehutanan (40)</p> <p>9.12. Pengelolaan SDM kehutanan dan kesetaraan gender (41)</p> <p>9.13. Penyelenggaraan pengawasan aparatur negara (42)</p>
RENCANA STRATEGIS 2010-2014		
	Visi	Hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan
	Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan 2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk memperkuat kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan berusaha 3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam 4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial DAS 5. Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan secara optimal 6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan
RENCANA STRATEGIS 2010-2014	Kebijakan Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan kawasan hutan 2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) 3. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan 4. Konservasi keanekaragaman hayati 5. Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan 6. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan

Prioritas Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan 2. Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KHP yang telah ditetapkan) 3. Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul 4. Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha 5. Penerbitan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan atau restorasi ekosistem (IUPHHK) –HA/RE) pada areal bekas tebangan (<i>logged over area/LOA</i>) seluas 2,5 juta ha 6. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50% 7. Jumlah <i>hotspot</i> kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, <i>illegal logging</i> dan <i>wildlife trafficking</i> sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan 8. Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat 9. Rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu sebanyak 108 unit DAS prioritas 10. Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 2,5 juta hektar 11. Terbangunnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta hektar 12. Terbangunnya hutan desa seluas 500.000 hektar 13. Penyediaan teknologi dasar dan terapan sulvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul 14. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peranserta pelaku utama dan pelau usaha dalam pemberdayaan masyarakat 15. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 16. Penanganan perkara, pemulihan hak-hak Negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014 17. Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2012 18. Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan sampai 50%, serta potensi kerugian Negara diturunkan hingga 25%
Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan 2. Program peningkatan usaha kehutanan 3. Program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan 4. Program peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat 5. Program penelitian dan pengembangan Kementerian Kehutanan 6. Program penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan 7. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara

		<p>Kementerian Kehutanan</p> <p>8. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kehutanan</p>
<p>RENCANA STRATEGIS 2010-2014</p>	<p>Kegiatan Utama</p>	<p>1. Perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan</p> <p>1.1. Penyusunan rencana makro kawasan hutan</p> <p>1.2 . Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH)</p> <p>1.3 . Pengukuhan kawasan hutan</p> <p>1.4 . Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan</p> <p>1.5 . Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan</p> <p>1.6 . Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Ditjen Planologi Kehutanan)</p> <p>1.7. Penyiapan pemantapan kawasan hutan</p> <p>2. Peningkatan usaha kehutanan</p> <p>2.1. Perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan hutan</p> <p>2.2. Peningkatan usaha hutan alam</p> <p>2.3. Peningkatan usaha hutan tanaman</p> <p>2.4. Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan</p> <p>2.5. Peningkatan usaha industri primer kehutanan</p> <p>2.6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Ditjen Bina Produksi Kehutanan)</p> <p>2.7. Pemantauan usaha kehutanan dan pembinaan tenaga teknis dan pengawas tenaga teknis PHPL</p> <p>3. Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan</p> <p>3.1. Pengembangan kawasan konservasi, ekosistem esensial dan pembinaan hutan lindung</p> <p>3.2. Pengembangan konservasi spesies dan genetik</p> <p>3.3. Penyidikan dan pengamanan hutan</p> <p>3.4. Pengendalian kebakaran hutan</p> <p>3.5. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan</p> <p>3.6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam)</p> <p>3.7. Pengembangan dan pengelolaan taman nasional</p> <p>3.8. Pengembangan pengelolaan konservasi sumberdaya alam</p> <p>4. Peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat</p> <p>4.1. Pengembangan perhutanan sosial</p> <p>4.2. Pengembangan perbenihan tanaman hutan</p> <p>4.3. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)</p> <p>4.4. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan</p> <p>4.5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial)</p> <p>4.6. Perencanaan, penyelenggaraan RHL, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS</p>

		<p>4.7. Perencanaan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi hutan mangrove</p> <p>4.8. Penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan</p> <p>4.9. Pengembangan persuteraan alam</p> <p>5. Penelitian dan pengembangan kementerian kehutanan</p> <p>5.1. Penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi</p> <p>5.2. Penelitian dan pengembangan peningkatan produktivitas hutan</p> <p>5.3. Penelitian dan pengembangan keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan</p> <p>5.4. Penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan</p> <p>5.5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Badan Litbang Kehutanan)</p> <p>6. Penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan</p> <p>6.1. Pengembangan penyuluhan kehutanan</p> <p>6.2. Peningkatan pelayanan penyuluhan kehutanan</p> <p>6.3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya</p> <p>6.4. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan)</p> <p>7. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenhut</p> <p>7.1. Pengawasan terhadap kinerja, keuangan dan administrasi pada wilayah kerja Inspektorat I</p> <p>7.2. Pengawasan terhadap kinerja, keuangan dan administrasi pada wilayah kerja Inspektorat II</p> <p>7.3. Pengawasan terhadap kinerja, keuangan dan administrasi pada wilayah kerja Inspektorat III</p> <p>7.4. Pengawasan terhadap kinerja, keuangan dan administrasi pada wilayah kerja Inspektorat IV</p> <p>7.5. Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN</p> <p>7.6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan)</p> <p>8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kehutanan</p> <p>8.1. Koordinasi perencanaan dan evaluasi Kementerian Kehutanan</p> <p>8.2. Penyelenggaraan administrasi dan penataan kepegawaian Kementerian Kehutanan</p> <p>8.3. Penyelenggaraan dan pembinaan tata hukum dan organisasi Kementerian Kehutanan</p> <p>8.4. Penyelenggaraan administrasi keuangan Kementerian Kehutanan</p> <p>8.5. Penyelenggaraan ketatusahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan Kementerian Kehutanan</p> <p>8.6. Pembinaan standarisasi, pengelolaan lingkungan dan penanganan perubahan iklim kehutanan</p> <p>8.7. Pembinaan dan koordinasi kerjasama luar negeri</p> <p>8.8. Penyiaran dan penyebarluasan informasi pembangunan kehutanan</p>
--	--	---

		8.9. Pengelolaan keuangan, penyaluran dan pengembalian dana bergulir pembiayaan pembangunan kehutanan 8.10 Pengendalian pembangunan kehutanan Regional I 8.11. Pengendalian pembangunan kehutanan Regional II 8.12. Pengendalian pembangunan kehutanan Regional III 8.13. Pengendalian pembangunan kehutanan Regional IV
--	--	--

* Daftar kegiatan utama disusun kembali berdasarkan program. Daftar asli yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis disusun berdasarkan tujuan.

**Nomer dalam tanda kurung sesuai dengan nomer kegiatan yang tertera dalam Rencana Strategis. Jumlah kegiatan adalah 42.

Sumber: Departemen Kehutanan (2001), Ministry of Forestry (2006a), Ministry of Forestry (2006b), Kementerian Kehutanan (2010).

BOX 2. RENCANA AKSI INDONESIA YANG TERKAIT DENGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	
BIODIVERSITY ACTION PLAN FOR INDONESIA (BAPI; RENCANA AKSI KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA)	
Sasaran	Melakukan pelestarian keanekaragaman hayati sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
National objectives	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlambat proses pengurangan hutan primer, lahan basah, terumbu karang dan habitat terestrai dan bahari lain yang penting bagi keanekaragaman hayati 2. Meningkatkan ketersediaan data tentang dan informasi keanekaragaman hayati dan mengupayakan agar data dan informasi tersebut tersedia untuk penentu kebijakan dan masyarakat umum 3. Memajukan cara-cara pemanfaatan sumberdaya biologi yang berkesinambungan
Strategy for actions	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi in-situ pada taman nasional dan kawasan perlindungan lain 2. Konservasi in-situ di luar taman nasional dan kawasan perlindungan lain 3. Konservasi pesisir dan bahari 4. Konservasi ex-situ 5. Peranserta masyarakat dalam melestarikan keanekaragaman hayati 6. Penelitian dan pengembangan 7. Pengelolaan dan penggunaan informasi 8. Program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
INDONESIAN BIODIVERSITY STRATEGY AND ACTION PLAN 2003-2020 (IBSAP)	
Visi	Terwujudnya masyarakat Indonesia yang peduli, berdaya, mandiri dan cerdas dalam melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara optimal, adil dan berkelanjutan melalui pengelolaan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sikap mental dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia, serta membangun unsur kelembagaan dan instrument hukum yang ada, agar peduli terhadap kelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat, selaras dengan ketentuan dalam peundangan nasional serta konvensi

	<p>nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memanfaatkan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal. 3. Melaksanakan pelestarian pemanfaatan keanekaragaman hayati secara seimbang. 4. Membuat kelembagaan dan penegakan hukum. 5. Melakukan resolusi konflik sumber daya alam.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kelaetarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang seimbang dan berkelanjutan. 2. Memperkuat dukungan sumber daya dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta kearifan lokal bagi perwujudan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang adil dan berkelanjutan. 3. Memperlambat, mengurangi dan menghentikan laju kerusakan/degradasi dan kepunahan keanekaragaman hayati nasional, regional maupun lokal dalam kurun waktu 2003-2020, diiringi upaya rehabilitasi dan pemanfaatan berkelanjutan. 4. Meningkatkan keberdayaan pranata kelembagaan, kebijakan, dan penegakan hukum di tingkat nasional, regional, lokal maupun adat agar efektif dan kondusif bagi pengelolaan keanekaragaman hayati secara sinergis, bertanggung jawab dan bertanggung gugat, adil, seimbang dan berkelanjutan. 5. Mewujudkan keadilan dan keseimbangan peran dan kepentingan, serta memperkecil konflik diantara seluruh komponen masyarakat bangsa Indonesia secara kondusif, sinergis, bertanggung jawab dan bertanggung gugat dalam pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

IV. LUARAN PROYEK DAN DAMPAK BANTUAN JEPANG DALAM BIDANG KEHUTANAN

PERKEMBANGAN PROYEK

Dari catatan terdahulu terungkap bahwa JICA memulai bekerja di Indonesia sejak tahun 1974 dalam bentuk proyek Kerjasama Pengembangan (Development Cooperation) atau Studi Pengembangan (Development Study) untuk melaksanakan proyek-proyek kecil tentang penghutanan kembali dan pengembangan kehutanan di beberapa lokasi di Indonesia. Proyek Kerjasama Teknik (Technical Cooperation) yang pertama adalah proyek yang bermitra dengan Perum Perhutani, dilaksanakan pada tahun 1977. Bantuan Hibah (Grant Aid) dimulai pada tahun 1980, diberikan kepada proyek reboisasi di Benakat (Sumatera Selatan).

Beberapa proyek memiliki skema pendanaan yang berbeda-beda. Proyek-proyek ini biasanya merupakan proyek jangka panjang yang memerlukan kajian khusus (Development Study), dilanjutkan dengan pembangunan gedung dan penyediaan mesin/peralatan (Bantuan Hibah), lalu diikuti dengan kemitraan dalam melaksanakan proyek (Kerjasama Teknis) dengan menggunakan gedung dan mesin/peralatan yang telah disediakan melalui proyek sebelumnya.

Sejak tahun 2000 Pemerintah Jepang tidak lagi memberikan Bantuan Hibah untuk bidang kehutanan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber melalui serangkaian wawancara, terungkap bahwa hal ini disebabkan oleh (1) membaiknya kondisi ekonomi Indonesia, yang diperkuat oleh data GNP (Produk Nasional Bruto), sehingga Indonesia memperoleh prioritas yang rendah untuk memperoleh dana bantuan, (2) Pemerintah Jepang memberikan prioritas dana bantuan untuk negara-negara Afrika, dan (3) jumlah dana yang diberikan oleh Jepang telah mengalami penurunan dan dialihkan untuk Dana Pinjaman.

Untuk Dana Pinjaman (Loan Aid), sejak tahun 1990an Kementerian Kehutanan tidak lagi menerima Dana Pinjaman dari Bantuan Luar Negeri (BLN/ODA, Overseas Development Agencies). Walaupun terdapat 3 proyek Kementerian Kehutanan yang terdaftar sebagai Dana Pinjaman, proyek-proyek tersebut sesungguhnya bukan merupakan proyek kemitraan dengan Kementerian Kehutanan. Mitra proyek-proyek tersebut adalah Departemen Pekerjaan Umum.

LUARAN PROYEK

Setiap proyek JICA telah dirancang untuk memberikan luaran (output) tertentu. Berdasarkan data pada Lembar Informasi, semua proyek JICA dapat memenuhi luaran sesuai dengan rencana. Luaran dari setiap proyek ini disajikan pada Lembar Informasi (Volume II). Luaran proyek secara umum disajikan pada Tabel 2.

Dari pengalaman masa lampau dengan proyek-proyek JICA dapat dipetik pembelajaran berharga bahwa rasa kepemilikan yang tinggi terhadap proyek JICA memberikan kontribusi yang besar terhadap kesuksesan suatu proyek. Proyek Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak merupakan salah satu contoh yang baik tentang penggabungan proyek JICA dengan perencanaan taman nasional, sehingga proyek JICA tersebut menjadi bagian dari taman nasional (Boks 3).

Tema proyek-proyek JICA masa lalu sangat bervariasi. Setiap proyek memberikan luaran, dampak dan pembelajaran yang sangat berharga. Pada Boks 4 dan 5 secara ringkas disampaikan beberapa contoh proyek JICA di Indonesia dengan beberapa output yang penting.

Tabel 2. Ringkasan luaran proyek JICA masa lampau.

LUARAN	CONTOH
Pembangunan kapasitas	Interpreter (interpreter yang terlatih untuk ekowisata di Cikaniki dan Bali), ahli persemaian (Benakat, KOFCO – Litbang Kehutanan, Bali), brigade pemadam kebakaran (Jambi, Riau, Kalimantan Barat).
Transfer teknologi	Satellite image processing, pemetaan berbasis SIG, pengelolaan persemaian, metoda penanaman di lahan alang-alang, produksi bibit secara massal, penanggulangan kebakaran hutan, transfer teknologi yang terkait dengan pengelolaan satwa (transmitter, photo traps), pemuliaan tanaman hutan, koleksi biologi/spesimen, teknik purifikasi mikroba.
Peningkatan ilmu pengetahuan	Pertukaran ahli (experts) dan counterparts ke dan dari Jepang, penyediaan berbagai makalah ilmiah dan jurnal, mensponsori counterpart Indonesia untuk menghadiri berbagai pertemuan nasional dan internasional.
Sistem	Pembalakan di wilayah pegunungan, sistem pengelolaan kebakaran hutan, prosesing data hot spot, deteksi dini kebakaran hutan, patroli kebakaran hutan, penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan secara partisipatif.
Pembentukan dan penguatan kelembagaan	Pembentukan: Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan dan Pusat Informasi Mangrove; penguatan: konservasi berbasis keikutsertaan masyarakat desa, Manggala Agni (brigade pemadam kebakaran hutan).
Kurikulum dan modul	Penanaman dan pengelolaan mangrove (kurikulum dan modul), berbagai modul tentang penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan, kurikulum konservasi (yang akan dimasukkan dalam kurikulum sekolah formal).
Peta	Peta berbasis SIG untuk beberapa lokasi (misalnya Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kalimantan Barat, Jambi, Riau), berbagai peta kerja, berbagai peta tematik (geologi, penyebaran satwa).
Hutan baru	Penanaman di lahan alang-alang di Benakat, penanaman di lahan bekas kebakaran hutan (Way Kambas), penanaman spesies mangrove (Bali), jalur hijau tahan api (Taman Nasional Berbak).
Dokumen	Studi kelayakan, dokumen perencanaan, laporan ilmiah, makalah, buku identifikasi, dokumen kebijakan, manual.
Materi penyadartahuan	Poster, buku, booklets, film, presentasi power point presentation, pins, papan pengumuman.
Rute ekowisata	Rute interpretasi di Cikaniki dan Bali untuk kegiatan ekowisata.
Kegiatan terkait sosial-ekonomi	Jalur hijau terpadu (Integrated Green Belt), home stay di Citalahab (Taman Nasional Gunung Halimun-Salak).

Bangunan dan fasilitasnya	Kompleks Benakat, Universitas Mulawarman, Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Pusat Informasi Mangrove, kantor Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Stasiun Penelitian Cikaniki, PIKA, Pusat Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan, Gedung Widyasatwaloka (LIPI), Gedung Divisi Tumbuhan dan Mikrobiologi (LIPI), pos-pos jaga untuk monitoring kebakaran hutan, rumah kaca, pusat pelatihan penanggulangan kebakaran hutan di Camp Granit, fasilitas pendukung untuk ekowisata.
Peralatan dan kendaraan	Perlengkapan penanggulangan kebakaran hutan, peralatan laboratorium, peralatan untuk penelitian lapangan (Stasiun Penelitian Cikaniki), kendaraan four-wheeled drive, kendaraan penumpang (minibus), sepeda motor, ekskavator, traktor.

BOKS 3. MEMADUKAN PROYEK DENGAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL: KASUS TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN-SALAK

JICA DAN PEMBANGUNAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN-SALAK

Sesuai Rencana Aksi Kemitraan Global (Global Partnership Action Plan) antara pemerintah Amerika Serikat dan Jepang pada tahun 1992, kedua negara bersepakat melaksanakan proyek kemitraan untuk mengelola dan melestarikan sumberdaya alam di negara berkembang. Negara berkembang yang dipilih adalah Indonesia. Indonesia meminta Pemerintah Jepang untuk melakukan kemitraan dalam bidang teknologi dan memberikan bantuan hibah untuk proyek lingkungan. Menanggapi permintaan tersebut, bantuan hibah diberikan untuk mendanai Biodiversity Conservation Project (Proyek Konservasi Keanekaragaman Hayati; 8 tahun; Fase I: 1995-1998, Fase II: 1998-2003) dan pembangunan fasilitas untuk konsevasi keanekaragaman hayati pada tahun 1997 di Cibinong (LIPI).

Lokasi utama untuk **Biodiversity Conservation Project** (BCP) adalah Taman Nasional Gunung Halimun (kini namanya diubah menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak), yang pada waktu itu merupakan taman nasional yang baru dikukuhkan di Jawa Barat (tahun 1992). Sebelumnya taman nasional tersebut merupakan bagian dari taman nasional yang berdekatan, yakni Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango.

BCP merupakan proyek yang terintegrasi, memadukan penelitian, pembangunan infrastruktur, serta pembuatan sistim informasi dan pengumpulan data sebagai dasar untuk pengelolaan taman nasional. Pada waktu proyek tersebut berakhir pada tahun 2003, telah banyak data dan informasi tentang taman nasional yang berhasil dikumpulkan (data keanekaragaman hayati, sosial-ekonomi, data fisik yang lain), siap untuk dimanfaatkan sebagai dasar ilmiah bagi pengelolaan taman nasional. Berdasarkan permintaan Pemerintah Indonesia, JICA kemudian menyetujui mendanai proyek lain, sebuah proyek kerjasama teknis yang berjudul **The Gunung Halimun-Salak National Park Management Project** (Proyek Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak; Februari 2004-2009), yang merupakan kelanjutan dari BCP.

Tujuan Gunung Halimun-Salak National Park Management Project adalah 'konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumberdaya alam lestari dapat dipromosikan di taman

nasional di Indonesia'. Skema pengelolaan taman nasional dan teknologi konservasi keanekaragaman hayati telah yang telah dikumpulkan melalui proyek sebelumnya akan dihimpun dan diaplikasikan untuk Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Dengan menggunakan model ini, pengetahuan dan teknik yang diperoleh akan disebarluaskan kepada taman nasional lain melalui serangkaian lokakarya dan pelatihan. Salah satu tujuan proyek ini adalah mengembangkan dan mempromosikan ekowisata dan pendidikan lingkungan.

TNGHS terletak di baratdaya kota Bogor, Jawa Barat. Secara administratif, taman nasional ini terletak pada tiga kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan and Banten: Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Lebak. Taman nasional ini awalnya dikukuhkan dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun karena kekayaan hayatinya. Hutan hujan tropika yang terdapat di TNGHS merupakan hutan hujan pegunungan yang terluas di Jawa Barat, lokasi yang baik untuk habitat alami berbagai spesies langka seperti macan tutul jawa *Panthera pardus melas*, elang jawa *Spizaetus bartelsi*, dan owa jawa *Hylobates molloch*. Hutan taman nasional juga berfungsi sebagai sumber air minum bagi kota-kota besar dan kawasan pertanian di Jawa Barat.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2003, kawasan taman nasional selanjutnya diperluas dari 40.000 ha hingga 113.357 ha, dengan memasukkan Gunung Salak, dan diberi nama Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Kawasan itu dibagi menjadi tiga Seksi: Seksi Lebak, Seksi Sukabumi dan Seksi Bogor. Kantor taman nasional terletak di Kabandungan, 72 km dari Bogor.

Kompleks kantor Kabandungan dibangun oleh JICA fase pertama. Saat pembangunan kantor selesai, kantor TNGHS tersebut merupakan kantor taman nasional terbaik di Indonesia dalam hal kualitas. Saat ini kantor yang dibangun dengan rancangan Jepang itu masih berfungsi sepenuhnya, walau beberapa material yang terbuat dari kayu perlu diganti karena aus dan kelembaban yang tinggi di lokasi tersebut.

Sekitar 18 km dari Kabandungan terdapat stasiun penelitian yang dibangun oleh JICA melalui BCP, disebut Stasiun Penelitian Cikaniki. Stasiun Penelitian Cikaniki dibangun untuk mendukung kegiatan penelitian dan ekowisata di TNGHS. Stasiun ini terletak di dalam taman nasional, sekitar 2 jam perjalanan dengan mobil (karena kondisi jalan bebatuan yang kurang baik) dari kantor taman nasional Kabandungan.

Kompleks Stasiun Penelitian Cikaniki terdiri dari gedung/kantor utama dan wisma tamu yang memiliki 5 kamar (4 tempat tidur per kamar), kamar mandi (di dalam kamar dan kamar mandi bersama) dan dapur kecil yang dilengkapi perlengkapan standar. Tidak jauh dari Stasiun Penelitian Cikaniki (200m) terdapat Canopy Trail (Jalur Kanopi), dibangun tahun 1998. Jalur kanopi ini merupakan salah satu dari tiga jalur kanopi yang terdapat di Indonesia (yang lainnya terdapat di Bodogol – Jawa Barat dan Bukit Bangkirai – Kalimantan Timur). Jalur sepanjang 100m ini terdiri dari serangkaian jembatan gantung sekitar 25-30m di atas permukaan tanah dan menjembatani lima pohon besar di dalam hutan. Jalur kanopi ini dapat digunakan untuk penelitian dan kegiatan di alam lainnya seperti pengamatan burung dan interpretasi alam.

PEMBELAJARAN

Diantara berbagai proyek JICA yang dilaksanakan di Indonesia, Proyek Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak merupakan satu-satunya proyek yang terkait dengan pengelolaan taman nasional. Proyek ini merupakan pengembangan dari proyek penelitian terdahulu mengenai inventarisasi keanekaragaman hayati (Biodiversity Conservation Project). Selama melaksanakan kedua proyek tersebut, TNGHS yang baru dikukuhkan telah mengalami perkembangan dengan pesat dan proyek JICA yang dilaksanakan di kawasan itu dinilai sangat berhasil.

Kunci keberhasilan proyek tersebut adalah karena faktor-faktor di bawah ini:

- a. Pemilihan waktu dan latar belakang yang tepat
Ketika proyek dimulai, taman nasional tersebut masih baru dikukuhkan dan perlu segera berkembang dengan cepat, dengan keterbatasan dana yang ada. Proyek JICA datang pada saat yang tepat untuk mengisi kesenjangan kegiatan yang harus segera dilakukan oleh taman nasional.
- b. PDM yang terencana dengan baik
Pada waktu PDM disusun, JICA dan pengelola taman nasional telah memiliki data keanekaragaman hayati yang cukup dari proyek sebelumnya (BCP) dan telah pula memiliki pengalaman bekerja bersama-sama dengan masyarakat di dalam dan di sekitar taman nasional. PDM disusun secara kolaboratif dengan staf taman nasional dan pada dasarnya menyatu dengan perencanaan taman nasional. Oleh karenanya, proyek JICA dengan mudah menjadi bagian dari pengelolaan taman nasional sehari-hari, dan tidak menjadi beban bagi taman nasional.
- c. Lokasi yang mudah dijangkau
TNGHS terletak tidak jauh dari Jakarta dan Bogor. Siapa saja mudah untuk mengunjungi taman nasional itu. Taman nasional tersebut juga mudah diawasi dan dipertahankan karena aksesnya yang mudah.
- d. Dukungan dari masyarakat lokal
Di dalam taman nasional terdapat lebih dari 300 desa. Dukungan dari masyarakat lokal untuk melaksanakan konservasi di taman nasional tentu sangat diperlukan untuk mempertahankan taman nasional tersebut. Dari kunjungan ke Desa Suka Galih dan diskusi dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa taman nasional tersebut didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Meskipun beberapa desa lain masih agak kurang mendukung, dengan kesabaran dan fasilitasi yang terus menerus dapat diharapkan bahwa semua masyarakat pada akhirnya akan mendukung taman nasional.
- e. Exit-strategi yang baik
Seperti telah disampaikan sebelumnya, proyek JICA telah menjadi bagian dari rutinitas tugas dan kewajiban taman nasional. Pada saat proyek JICA selesai, kegiatan dengan mudah dilanjutkan oleh taman nasional.

Kisah keberhasilan TNGHS tentu saja tidak luput dari kendala. Setelah proyek JICA berakhir, TNGHS harus berjuang untuk dapat merawat bangunan dan fasilitas yang dibangun oleh JICA. Kondisi Stasiun Penelitian Cikaniki kini sudah mulai agak rusak karena kendala perawatan. Stasiun penelitian tersebut agaknya tidak sering dimanfaatkan sesuai dengan rencana semula. Beberapa peralatan tidak berfungsi dengan baik karena kelangkaan listrik (misalnya lemari pendingin). Dana yang tersedia dari Kementerian Kehutanan tampaknya belum mencukupi untuk merawat stasiun penelitian. Jembatan gantung di Jalur Kanopi sudah habis masa pakainya pada tahun 2008, sepuluh tahun setelah dibangun. Sayangnya, beberapa bagian alas jembatan gantung telah dicuri dan jembatan gantung itu secara resmi terpaksa ditutup oleh pengelola taman nasional sejak tahun lalu.

BOKS 4. BALAI BESAR PENELITIAN BIOTEKNOLOGI DAN PEMULIAAN TANAMAN HUTAN: INVESTASI JICA YANG TIDAK TERNILAI UNTUK PENGEMBANGAN ILMU KEHUTANAN

PERAN JICA DALAM MENGEMBANGKAN BBPBPTH

Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPBPTH) yang luasnya sekitar 5,5 ha terletak di Desa Purwobinangun, sekitar 10km di utara Yogyakarta. Balai Besar Penelitian ini pada awalnya merupakan satu unit kecil yang menangani produksi benih dibawah Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi, dengan fungsi utama memproduksi benih pohon untuk rehabilitasi lahan. Mengingat pentingnya fungsi tersebut, selaras dengan meningkatnya kebutuhan benih pohon yang baik dalam jumlah besar untuk kebutuhan rehabilitasi hutan, Pemerintah Indonesia memohon kepada JICA untuk mengembangkan dan mengintensifkan unit kecil ini.

Menanggapi permintaan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang – melalui JICA – mengembangkan proyek Bantuan Hibah berjudul **Forest Tree Improvement Center Construction** (Pembangunan Balai Pemuliaan Tanaman Hutan). Melalui proyek ini (1990-1992), unit produksi benih yang awalnya kecil telah dikembangkan menjadi unit yang lebih besar dan lebih baik melalui pembangunan gedung dan penyediaan perlengkapan/peralatan, khususnya untuk memproduksi benih unggul dalam jumlah besar. Fasilitas yang dibangun melalui Bantuan Hibah ini adalah gedung utama (untuk kantor, perpustakaan, ruang kerja, penyimpanan kering-dingin, laboratorium molekuler, dan laboratorium kultur jaringan), rumah kaca, persemaian, arboretum, dan beberapa unit perumahan.

Setelah pembangunan gedung dan penyediaan peralatan selesai, proyek kelanjutan yang lain, sebuah proyek Kerjasama Teknik, dimulai pada bulan Juni 1992. Proyek tersebut, berjudul **Forest Tree Improvement Project**, dilaksanakan selama sepuluh tahun (1992-2002) dalam dua fase lima tahunan (1992-2007; 2007-2002). Tujuan proyek tersebut adalah mendukung program reboisasi di Indonesia melalui pengembangan teknik pemuliaan pohon, serta meningkatkan sumber benih yang diperlukan oleh para pelaku reboisasi.

Selama pelaksanaan proyek tersebut, para peneliti Jepang dan Indonesia telah bekerja bersama untuk menjalankan kegiatan utama proyek, yaitu (1) mengembangkan sumber benih, (2) mengembangkan teknik pembenihan, (3) melakukan penyebarluasan benih dan informasi penting yang terkait, dan (4) memberikan saran dalam menjalankan kegiatan pemuliaan benih pohon. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan penelitian ilmiah.

Bersamaan dengan pembangunan gedung dan kegiatan ilmiahnya, unit perbenihan telah mengalami perubahan sebagai berikut:

- 1985 – 1990 : Unit Produksi Benih dibawah Direktorat Jendaaeral Reboisasi dan Rehabiltasi Lahan
- 1994 : Bagian Pemuliaan Pohon; dibawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Litbang Kehutanan)
- 2000 : Balai Bioteknologi Hutan dan Pemuliaan Tanaman Hutan (dibawah Litbang Kehutanan)
- 2005 : Balai Penanaman Hutan (dibawah Litbang Kehutanan)
- 2006 : Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (dibawah Litbang Kehutanan)

Saat ini, 18 tahun setelah gedung selesai dibangun dan 8 tahun setelah berakhirnya Kerjasama Teknik, Balai Besar tersebut masih berjalan dengan sangat baik. Gedung utama dapat dirawat dengan baik dan hampir semua peralatan (90%) dapat berfungsi dengan baik pula. Dengan peralatan yang

telah tersedia dan sumberdaya manusia handal yang dihasilkan dari proyek JICA masa lampau, Balai Besar itu telah berhasil melaksanakan penelitian dan menselaraskan diri dengan penelitian-penelitian terkini. Kini BBPBPTH telah berhasil mengembangkan pemuliaan genetik untuk berbagai jenis pohon, termasuk akasia *Acacia mangium*, eukaliptus *Eucalyptus pellita*, kayu putih *Melaleuca cajuputi*, sengon *Paraserianthes falcataria*, jati *Tectona grandis*, merbau *Intsia bijuga*, cendana *Santalum album*, pulai *Alstonia scholaris*, sukun *Artocarpus communis*, dan ulin *Eusyderoxylon zwageri*.

Mengingat bahwa kecenderungan penelitian kehutanan dalam bidang perbenihan perlahan-lahan mulai beralih kepada genetika dan biologi molekuler, Balai besar tersebut juga mengembangkan laboratorium dan sumberdaya manusia untuk melaksanakan penelitian dalam bidang itu. Kini BBPBPTH memiliki 70 orang peneliti dan 75 orang staf penunjang, dan memfokuskan penelitian pada tiga bidang: analisa molekuler dan aplikasi bioteknologi untuk pembibitan, konservasi genetik, dan pemuliaan pohon/uji pembenihan. Selain itu, laboratorium molekuler dan genetika telah menerima standar ISO, sehingga laboratorium ini dapat melaksanakan berbagai analisa yang dapat diterima oleh komunitas ilmiah internasional.

Dari wawancara dengan beberapa narasumber terungkap bahwa BBPBPTH merupakan salah satu proyek JICA yang paling berhasil. Salah satu faktor penting dari suatu proyek adalah keberlanjutan dan dampak proyek. BBPBPTH telah dapat membuktikan bahwa keberlanjutan proyek JICA terdahulu ternyata dapat dipertahankan dan bahkan menciptakan dampak yang luas. Ketika Kerjasama Teknik dengan JICA berakhir pada tahun 2002, dikhawatirkan bahwa Balai tersebut tidak dapat mempertahankan laboratorium yang biaya perawatannya tinggi, khususnya laboratorium genetika molekuler. Kini laboratorium tersebut merupakan unit yang termaju dibandingkan dengan laboratorium lain yang dimiliki oleh Balai Besar itu.

PEMBELAJARAN

Beberapa faktor pendukung yang membantu kesuksesan Balai Besar adalah:

- (1) Penelitian yang dihasilkan oleh Balai Besar telah dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan, sehingga Balai Besar dapat bekerja secara konsisten. Selain itu, BBPBPTH dapat mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi perbenihan kedepan karena adanya rancangan yang baik sejak awal;
- (2) Kualitas peralatan merupakan kualitas terbaik pada masa itu. Peralatan ini dapat dirawat dan bahkan ditambah oleh Balai Besar dari sumber pendanaan yang lain ketika proyek berakhir. Kelengkapan peralatan tentu sangat penting untuk menciptakan kerjasama lebih lanjut dengan instansi penelitian internasional lain;
- (3) Mengingat bahwa tugas pokok dan fungsi utama BBPBPTH adalah penelitian dalam bidang kehutanan, Balai Besar tersebut memperoleh dukungan penuh dari Kementerian Kehutanan dan mendapatkan dana yang memadai dari Pemerintah untuk perawatan dan melaksanakan kegiatan penelitian;
- (4) Melalui Kerjasama Teknik yang cukup lama, pembentukan sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan baik. Pengetahuan dan transfer teknologi berlangsung dengan sangat baik dan beberapa staf Balai Besar bahkan memperoleh kesempatan ke Jepang untuk memperoleh gelar yang lebih tinggi. Hampir semua staf peneliti tetap bekerja di Balai Besar dan memilih berkarier sebagai peneliti;
- (5) Lokasi Balai Besar berdekatan dengan kota besar Yogyakarta, sehingga staf dapat dengan mudah menjangkau Balai Besar dari kota Yogyakarta. Lokasi yang dekat dengan kota besar ini juga sangat penting untuk memudahkan perawatan dan pengamanan (untuk peralatan dan percobaan penanaman).

Masalah dan kendala masih terjadi, yakni:

- (1) Meskipun proses penyediaan peralatan telah dilaksanakan dengan hati-hati, beberapa peralatan masih perlu disesuaikan dengan kondisi Indonesia;
- (2) Peralatan dan sampel memerlukan listrik yang terus-menerus. Generator untuk cadangan listrik selalu diperlukan walau memerlukan dana yang cukup besar.

Beberapa dampak nyata yang penting dari proyek tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pengetahuan dan produk yang diperoleh dari BBPBPTH telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan reboisasi dan pengembangan hutan tanaman industri, sehingga memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pembangunan kehutanan dan pengurangan laju deforestasi di Indonesia;
- (2) Beberapa kantor pemerintahan lokal juga melakukan kerjasama dengan BBPBPTH, misalnya kerjasama dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pembangunan Taman Hutan Raya Ngarjoso, kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk mengembangkan penanaman nyamplung *Callophyllum inophyllum*;
- (3) BBPBPTH telah melakukan kerjasama penelitian dengan berbagai lembaga, termasuk dengan ACIAR (Australian Centre for International Agricultural Research), Biodiversity International (dahulu IPGRI/ International Plant Genetic Resources Institute), CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), dan Universitas Kyushu (Jepang);
- (4) Kerjasama lanjutan ternyata memicu pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. Sampai saat ini empat staf peneliti telah memperoleh gelar yang lebih tinggi (Magister dan Doktor) dari universitas di Jepang, sementara lima staf lainnya memperoleh gelar dari universitas di Australia;
- (5) BBPBPTH dapat melakukan kerjasama dengan universitas lokal. Di Yogyakarta terdapat sebuah universitas yang baik (Universitas Gadjah Mada). Mahasiswa Universitas tersebut (khususnya mahasiswa kehutanan) dapat melaksanakan berbagai penelitian dengan menggunakan peralatan yang dimiliki oleh Balai Besar, sehingga keberadaan Balai Besar berdampak pula terhadap pendidikan tinggi di Indonesia;
- (6) BBPBPTH telah mengalami peningkatan status kelembagaan: bermula dari unit kecil, kini telah menjadi Balai Besar yang modern.

BOKS 5. PUSAT PELATIHAN CAMP GRANIT: MENANGGAPI TANTANGAN KRISIS KEBAKARAN HUTAN

Selama tahun 1997-1998 iklim di Indonesia sangat kering karena adanya fenomena El Nino. Kebakaran hutan di hutan dan lahan-lahan pertanian merebak di mana-mana, khususnya di sepanjang pantai timur Sumatra (Jambi, Riau, Sumatera Selatan) dan bagian barat Kalimantan, sehingga berdampak buruk untuk kesehatan dan penerbangan di wilayah tersebut dan bahkan di Negara tetangga (Singapura dan Malaysia). Untuk menanggulangi krisis tersebut, Pemerintah Jepang – melalui JICA – memberikan bantuan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran yang terjadi di lahan-lahan yang berdekatan dengan hutan.

Bantuan Jepang untuk menanggulangi kebakaran hutan di daerah-daerah yang paling rawan (Provinsi Jambi, Riau dan Kalimantan Barat) dilaksanakan melalui beberapa proyek yang berkelanjutan: **Forest Fire Prevention Management Project** (FFPMP, Proyek Pengelolaan dan Pencegahan Kebakaran Hutan; 1996-2006; Kerjasama Teknis), **The Forest Fire Prevention by Initiative Forest Area Buffer Zone People Project** (Proyek Pencegahan Kebakaran Hutan Melalui Inisiatif Masyarakat di Daerah Penyangga; 2006-2009; Kerjasama Teknis), dan **Improvement of Forest Fire Equipment** (Perbaikan Peralatan

Kebakaran Hutan; 2001; Bantuan Hibah). Jambi, Riau dan Kalimantan Barat merupakan wilayah yang paling rawan dan pada waktu itu belum ada bantuan asing yang diberikan kepada provinsi-provinsi tersebut.

Salah satu tujuan penting proyek adalah melaksanakan pelatihan untuk pasukan pemadam kebakaran (“Manggala Agni”) dan untuk masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan yang rawan kebakaran. Dari pelatihan ini diharapkan diperoleh pencegahan kebakaran hutan jangka panjang berbasis partisipasi masyarakat secara aktif (termasuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi). Camp Granit dipilih sebagai lokasi pelatihan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.

Pusat Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan di Camp Granit terletak di Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Riau. Pusat Pelatihan dengan luas 5 ha itu berjarak sekitar 6 jam perjalanan dari Jambi atau 7 jam perjalanan dari Pekanbaru (ibukota Provinsi Riau). Untuk menuju Pusat Pelatihan itu, perlu digunakan kendaraan lapangan yang baik, mengingat bahwa jalanan yang menuju ke Pusat Pelatihan (12 km) masih berupa jalan tanah yang licin pada waktu hujan.

Lokasi Pusat Pelatihan tersebut sebetulnya merupakan bekas lokasi penambangan batu granit. Selain gedung utama, terdapat pula asrama untuk 36 orang (9 kamar, masing-masing untuk 4 orang), kantor, ruang kelas, fasilitas pelatihan lapangan, dan berbagai peralatan untuk latihan pemadaman kebakaran hutan. Pada waktu proyek FFPMP dilaksanakan, Pusat Pelatihan tersebut dimanfaatkan secara intensif untuk para staf Kementerian Kehutanan (Manggala Agni) dan juga untuk masyarakat lokal yang turut serta dalam menanggulangi kebakaran hutan (MPA, Masyarakat Peduli Api). Ratusan orang telah dilatih di Pusat Pelatihan itu. Saat ini Pusat Pelatihan dapat dipakai untuk berbagai kegiatan pelatihan, pendidikan dan kegiatan lain (rekreasi, ekowisata, monitoring keanekaragaman hayati).

PROYEK JICA DAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Pemerintah Jepang melalui proyek-proyek JICA telah membantu Indonesia dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Tiga proyek JICA masa lampau telah didaftar pada bidang kehutanan, namun sesungguhnya dilaksanakan oleh LIPI. Gambaran umum suatu proyek dan keberlanjutannya disampaikan pada Boks 6.

Box 6. PERAN JICA DALAM PENGEMBANGAN PUSAT PENELITIAN BIOLOGI - LIPI

Pada tahun 1993 pemerintah Jepang dan Amerika Serikat telah menyepakati kerjasama tigapihak dengan Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Biodiversity Action Plan for Indonesia (BAPI). Untuk melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia, Pemerintah Amerika Serikat membantu pendirian dan pendanaan sebuah LSM yang diberi nama Yayasan Keanekaragaman Hayati (Yayasan KEHATI), sementara Pemerintah Jepang menyediakan bantuan hibah untuk Biodiversity Conservation Project (BCP).

Melalui BCP (Bantuan Hibah), Pemerintah Jepang membangun Divisi Zoologi (Pusat Penelitian Biologi) di Cibinong, Pusat Informasi Konservasi Alam (PIKA) di Bogor, dan fasilitas pengelolaan di Taman Nasional Gunung Halimun. Pusat Penelitian (Puslit) Biologi merupakan bagian dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), sementara PIKA dan Taman Nasional Gunung Halimun (belakangan namanya

diubah menjadi Taman Nasional gunung Halimun-Salak) dikelola oleh Kementerian Kehutanan.

Posisi LIPI adalah langsung di bawah Presiden Indonesia, dengan harapan bahwa lembaga ini dapat berperan besar dalam melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia. Puslit Biologi merupakan bagian dari LIPI yang menangani biologi dan peran utamanya adalah merumuskan kebijakan penelitian biologi. Puslit Biologi berperan penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian biologi secara menyeluruh, serta melaksanakan pengelolaan spesimen dan penelitian-penelitian dasar. Puslit Biologi dan Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan – Kebun Raya Bogor secara struktural berada di bawah koordinasi Deputi Ilmu Hayati LIPI. Puslit Biologi terdiri dari Divisi Botani (Herbarium Bogorisensis dan Laboratorium Treub), Divisi Zoologi (Museum Zoologi Bogor) dan Divisi Mikrobiologi. Ketiga Divisi ini didukung oleh Divisi Administrasi dan Divisi Pengelolaan Fasilitas dan Koleksi.

Melalui skema Bantuan Hibah, Pemerintah Jepang memberikan fasilitas penelitian dan penyimpanan spesimen kepada Divisi Zoologi pada tahun 1995 dan 1996. JICA juga menyediakan Kerjasama Teknik untuk mendukung penelitian selama delapan tahun mulai Juli 1995 hingga Juni 2003 melalui **Biodiversity Conservation Project**.

Pada Fase I (1997-2000) dana dimanfaatkan untuk membangun Gedung Widyasatwaloka, yang juga berfungsi untuk menyimpan koleksi hewan, menyediakan peralatan penelitian laboratorium dan membuat Local Areal Network. Tujuan proyek tersebut adalah membangun Pusat Informasi Keanekaragaman Hayati dan PIKA. Fase II (2000-2003) ditujukan untuk meneruskan dan meningkatkan pangkalan data IBIS untuk koleksi botani dan zoologi, survei lapangan, penambahan referensi dan pangkalan data untuk para peneliti. Sementara itu, koleksi mikroba masih dikembangkan.

Untuk melanjutkan upaya eksplorasi spesimen dan menemukan nilai ekonomi spesimen tersebut, Pemerintah Indonesia telah meminta bantuan Pemerintah Jepang untuk membangun fasilitas baru. Pemerintah Jepang selanjutnya memberikan Bantuan Hibah melalui proyek berjudul **Improvement of Research Facilities for Biodiversity Conservation and Utilization** (Perbaikan Fasilitas Penelitian untuk Konservasi dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati; 2004-2006). Bantuan Hibah ini dipakai untuk membangun fasilitas riset Divisi Botani dan Mikrobiologi di Cibinong dan menyelesaikan kompleks Biodiversity Center (Zoologi, Botani dan Mikrobiologi). Kompleks ini diharapkan dapat menjadi insitusi induk dalam bidang keanekaragaman hayati untuk Indonesia dan bahkan internasional.

Puslit Biologi merupakan lembaga kunci dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati dan memiliki koleksi specimen yang terbanyak di Asia Tenggara. Fasilitas specimen hewan di lembaga ini diganggu pada tahun 1817 di Bogor oleh Pemerintah Belanda yang pada waktu itu menguasai Indonesia. Spesimen-spesimen telah disimpan sejak tahun 1800an dan kini jumlahnya telah lebih dari 1,6 juta, melebihi koleksi specimen di negara-negara lain, termasuk keseluruhan negara ASEAN lain. Sayangnya lembaga penelitian ini sedang mengalami penuaan fasilitas dan penurunan kualitas specimen-spesimen yang amat berharga bagi dunia ilmiah. Untuk memastikan agar perawatan dan pengelolaan specimen dapat dilakukan dengan baik, Pemerintah Jepang memberikan proyek Kerjasama Teknik lagi, berjudul **Project on Improvement of Collection Management and Biodiversity Research Capacity of the Research Center for Biology, Indonesian Institute of Sciences in Indonesia** (Proyek Peningkatan Pengelolaan Koleksi dan Kapasitas Penelitian Keanekaragaman Hayati pada Pusat Penelitian Biologi LIPI).

Keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat tinggi merupakan aset negara yang amat berharga. Indonesia – melalui LIPI – telah memiliki koleksi spesies yang amat banyak (tumbuhan, hewan, mikroba). Memperoleh dan merawat koleksi spesies ini memerlukan dana yang tinggi. Melalui proyek JICA, specimen-spesimen ini terawat dengan baik. Kunjungan ke Puslit Biologi membuktikan bahwa proyek JICA dapat dilanjutkan oleh LIPI pada saat proyek JICA berakhir.

DAMPAK

Pengkajian terhadap dampak dari suatu proyek sesungguhnya merupakan suatu pekerjaan yang sulit mengingat bahwa dampak suatu proyek hanya dapat dikenali setelah proyek berakhir dalam jangka waktu yang lama. Selain itu - pada banyak kasus - dampak tidak serta merta mudah dirumuskan. Beberapa dampak yang berhasil diidentifikasi selama kunjungan lapangan disajikan pada Tabel 3. Sebagai bahan ilustrasi, pada Boks 7 disampaikan tentang dampak proyek JICA terhadap peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Tabel 3. Dampak yang dapat diidentifikasi dari hasil kunjungan lapangan ke Yogyakarta, Jambi, Sukabumi dan Cibinong.

Dampak	Judul Proyek				
	BBPBPTH	FFPMP	TNGHS	Puslit Biologi	CMBRC
Perubahan sikap		x	x		
Pembangunan/pembentukan kelembagaan	x	x	x		
Kemitraan dengan instansi lain	x		x	x	x
Pembangunan sumberdaya manusia	x	x	x	x	x
Reboisasi dan restorasi ekosistem	x	x	x		
Peningkatan jumlah pengunjung			x	x	x
Sumber pendapatan bagi masyarakat lokal		x	x		x
Penelitian ilmiah dan makalah ilmiah	x			x	x

Catatan:

BBPBPTH - Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (Yogyakarta)

FFPMP – Forest Fire Prevention and Management Project/Proyek Pengelolaan dan Pencegahan Kebakaran Hutan (Jambi)

TNGHS – Proyek Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (Sukabumi)

Puslit Biologi – Pusat Penelitian Biologi – LIPI (Cibinong)

CMBRC - Project on Improvement of Collection Management and Biodiversity Research Capacity of the Research Center for Biology LIPI (Cibinong); Proyek Peningkatan Pengelolaan Koleksi dan Kapasitas Penelitian Keanekaragaman Hayati pada Pusat Penelitian Biologi LIPI.

BOKS 7. JALUR HIJAU KEBAKARAN HUTAN DAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL: KASUS SUNGAI RAMBUT, JAMBI

Sungai Rambut adalah sebuah desa yang terletak di dekat Taman Nasional Berbak, Jambi. Desa ini, bersama-sama dengan desa tetangga Rantau Rasau, telah terpilih menjadi lokasi untuk proyek JICA berjudul Forest Fire Prevention and Management Project (FFPMP, Proyek Pengelolaan dan Pencegahan Kebakaran Hutan; Fase I: 1996-2001, Fase II: 2001-2006). Melalui proyek FFPMP ini diadakan program penanggulangan kebakaran hutan bersama masyarakat di Provinsi Jambi dan Kalimantan Barat. Program ini dimaksudkan untuk mencegah kebakaran hutan dalam jangka panjang melalui keikutsertaan aktif (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) oleh masyarakat.

Secara administratif Desa Sungai Rambut terletak di Kecamatan Jabung. Untuk mencapai desa tersebut diperlukan 2 jam perjalanan darat dengan mobil dan dilanjutkan dengan 1,5 jam perjalanan dengan menggunakan perahu motor. Desa ini berbatasan dengan Taman Nasional Berbak. Taman Nasional Berbak merupakan wilayah yang sangat penting untuk melindungi hutan gambut beserta keanekaragaman hayatinya, serta telah dikukuhkan sebagai Ramsar Site yang pertama di Indonesia.

Peristiwa kebakaran hutan banyak disebabkan oleh kegiatan masyarakat lokal. Dengan demikian, jika api yang berawal dari tempat yang berdekatan dengan taman nasional tidak dapat dikelola, maka kebakaran dapat dengan mudah menjalar ke taman nasional dan merusak ekosistem taman nasional tersebut. Sejak awal tahun 1980an di Taman Nasional Berbak sering terjadi kebakaran, berawal dari tepi-tepi daerah transmigrasi dan hutan yang mengalami konversi lahan.

Pada proyek JICA ini dilakukan partisipasi aktif masyarakat lokal untuk mencegah kebakaran hutan melalui pembuatan jalur hijau yang tahan api di perbatasan taman nasional, sekaligus untuk mengintensifkan pemanfaatan lahan petani. Jalur hijau tersebut dimaksudkan untuk melindungi hutan taman nasional dari kebakaran hutan dan melindungi lahan masyarakat terhadap serangan babi hutan.

Jalur hijau terdiri dari pagar kawat (untuk melindungi ladang dan kebun dari serangan hama babi hutan), parit (untuk menyimpan air dan memutus penyebaran api di dalam tanah), dan jajaran pohon yang tahan api (untuk mencegah api dan babi hutan, sekaligus untuk mengintensifkan pemanfaatan lahan milik petani). Pada fase pertama proyek ini, aren *Areca catechu*, albizia *Paraserianthes falcataria*, dan lamtoro *Leucaena leucocephala* ditanam sebagai jalur hijau. Pada fase kedua, ditanam pohon buah dan pohon serbaguna seperti rambutan *Nephelium lappaceum*, durian *Durio zibethinus*, dan melinjo *Gnetum gnemon*. Petani kelompok target turut serta melaksanakan pembuatan jalur hijau ini dengan bahan-bahan bantuan FFPMP.

Tanaman aren dan jenis lain yang telah tumbuh tinggi dapat dilihat dengan mudah dari kejauhan, menunjukkan bahwa jalur hijau telah terbangun dengan baik. Kebakaran hutan telah banyak berkurang karena adanya jalur hijau dan mungkin juga karena faktor lingkungan yang mendukung (musim kemarau yang pendek selama beberapa tahun terakhir).

Kepala Desa dan beberapa petani Desa Sungai Rambut mengakui bahwa proyek JICA masa lampau telah memberikan kesempatan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka melalui penjualan aren dan buah-buahan lain yang ditanam di jalur hijau. Serangan hama babi hutan juga berkurang, walau sesekali masih terdapat serangan babi hutan karena pagar kawat telah rusak di beberapa tempat. Masyarakat lokal sebetulnya berharap bahwa JICA dapat membantu mereka untuk menyediakan fasilitas air minum dan kolam-kolam ikan.

V. RELEVANSI BANTUAN JEPANG DALAM BIDANG KEHUTANAN

RELEVANSI PROYEK-PROYEK JICA TERHADAP KEBIJAKAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

Kajian apakah proyek-proyek JICA masa lampau relevan dan searah dengan kebijakan Kemhut disajikan pada Tabel 4. Dari hasil memperbandingkan proyek-proyek JICA dengan Renstra 2005-2009, ternyata proyek-proyek JICA sangat relevan dengan 2 (dari 5 kebijakan prioritas), yakni Kebijakan #3: Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan dan Kebijakan #4: Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Selama masa periode ini (2005-2009) Kemhut mengalami permasalahan berat tentang pembalakan liar (illegal logging), namun tidak satu pun proyek JICA yang menangani pembalakan liar. Hal ini kemungkinan karena isu ini sangat sensitif. Selain itu, pada periode tersebut telah ada proyek besar yang didanai oleh bantuan luar negeri lain yang secara spesifik menangani pembalakan liar, misalnya FLEG (Forest Law Enforcement and Governance) dan diteruskan dengan FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance, and Trade), didanai oleh European Union.

Kebijakan yang terkait dengan pemantapan kawasan hutan juga tidak diberi dukungan u oleh JICA pada periode 2005-2009 dan selanjutnya (2010-2014). Mengingat bahwa hal ini sesungguhnya memang perlu ditangani dan diselesaikan secara internal antara pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya, dapat dimengerti kalau JICA tidak mempunyai proyek yang terkait dengan pemantapan kawasan hutan.

Selama periode 2010-2014 JICA secara konsisten melanjutkan dukungan terhadap kebijakan Kemhut mengenai konservasi, rehabilitasi, serta pembangunan masyarakat. Selain itu, JICA juga menunjukkan dukungan yang tinggi terhadap kebijakan mengenai pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan. Pemerintah Indonesia pada saat itu sedang disibukkan dengan penanggulangan kebakaran hutan yang antara lain disebabkan oleh adanya fenomena El Niño.

Tabel 4. Dukungan proyek-proyek JICA masa lalu dengan kebijakan Kementerian Kehutanan.

KEBIJAKAN PRIORITAS	DUKUNGAN PROYEK JICA
Rencana Strategis 2005-2009	
1. Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal	Tidak ada dukungan. Tidak ada dukungan proyek JICA untuk issue illegal logging. Dukungan kebijakan ini diberikan oleh bantuan negara lain.
2. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan	Tidak ada dukungan proyek JICA pada periode Renstra ini. Proyek JICA yang secara spesifik menangani hal ini tidak ada, walaupun pada masa lalu (tahun 1980an dan 1990an) JICA mempunyai proyek yang berkaitan dengan industri kehutanan.
3. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan	Dukungan tinggi. JICA pernah menyelenggarakan beberapa proyek yang terkait dengan kebijakan ini, termasuk proyek-proyek yang dilaksanakan pada beberapa taman nasional.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan	Dukungan tinggi. Beberapa proyek JICA yang terkait dengan kebijakan ini merupakan kombinasi dengan kebijakan no. 3 (rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan).
5. Pemantapan kawasan hutan	Dukungan rendah. Namun demikian, JICA pernah memiliki proyek yang terkait dengan inventarisasi dan monitoring hutan.
Rencana Strategis 2010-2014 (peluang menggunakan luaran/dampak dari proyek yang telah dilaksanakan)	
1. Pemantapan kawasan hutan	Dukungan rendah. Dukungan dari proyek JICA adalah dalam bidang inventarisasi dan monitoring hutan saja. Walau dukungan JICA rendah, inventarisasi dan monitoring merupakan tulang punggung untuk kegiatan terkait lainnya.
2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS)	Dukungan tinggi. Banyak proyek JICA yang terkait dengan pembibitan massal dan rehabilitasi. Beberapa proyek juga secara spesifik menangani perbaikan dan peningkatan fungsi DAS.
3. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan	Dukungan tinggi. JICA mempunyai proyek-proyek penting berdurasi panjang tentang penanggulangan kebakaran hutan. Luaran dari proyek-proyek tersebut terbukti sangat berguna hingga saat ini.
4. Konservasi keanekaragaman hayati	Dukungan tinggi. Proyek-proyek JICA mendukung Kemhut dan LIPI dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati. Jika diamati dampaknya, proyek terkait konservasi keanekaragaman hayati kemungkinan memiliki dampak yang tertinggi.
5. Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan	Dukungan rendah. Beberapa proyek memiliki kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan. Namun demikian, tidak ada proyek yang secara spesifik menangani kebijakan ini.
6. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan	Dukungan tinggi. Beberapa proyek JICA mempunyai target spesifik terkait dengan kebijakan ini. Terdapat pula proyek-proyek yang mendukung kombinasi kebijakan ini dan kebijakan tentang konservasi keanekaragaman hayati.

Untuk mengkaji apakah proyek-proyek JICA masa lalu selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan sekaligus menentukan peran proyek-proyek tersebut, dipergunakan sebuah matriks untuk memperbandingkan kegiatan yang telah dilakukan atau direncanakan oleh Kementerian Kehutanan dengan proyek-proyek JICA masa lalu. Pada Tabel 5 disajikan hubungan antara proyek-proyek JICA yang diselenggarakan antara tahun 2001-2005 (Rencana Strategis pertama). Selama periode tersebut, Rencana Strategis tidak dipilah dalam kegiatan dan hanya dirumuskan sampai pada tingkatan program.

Tabel 6 menyajikan situasi yang serupa, namun pada kurun waktu yang berbeda (2005-2009). Selama kurun waktu ini, program Kementerian Kehutanan telah dirinci sampai pada tingkatan kegiatan. Tabel selanjutnya (Tabel 7) menyajikan kontribusi proyek-proyek JICA yang dapat diberikan kepada Rencana Strategis yang kini sedang berjalan (2010-2014).

Untuk mempermudah analisa, proyek-proyek JICA yang disajikan pada Tabel 5,6 dan 7 dihimpun berdasarkan tema proyek. Proyek yang dilakukan sebelum tahun 2001 tidak dimasukkan dalam analisa, mengingat bahwa Rencana Strategis Kementerian Kehutanan baru dirumuskan sejak tahun 2001.

Dari matriks tersebut dapat disimpulkan bahwa selama tiga kurun waktu pelaksanaan Rencana Strategis, bantuan Jepang dalam bidang kehutanan sesungguhnya telah selaras dengan Rencana Strategis untuk setiap kurun waktu tersebut. Secara umum, proyek-proyek JICA memiliki keselarasan yang tinggi dengan (a) perlindungan dan konservasi, (b) rehabilitasi dan pemulihan hutan (c) konservasi keanekaragaman hayati, (d) pelatihan dan peningkatan sumberdaya manusia, dan (e) penelitian dan pengembangan. Kebanyakan kegiatan dalam proyek-proyek JICA selaras dengan kegiatan perlindungan/konservasi dan rehabilitasi/pemulihan.

Beberapa proyek JICA dilaksanakan melalui kerjasama dengan LIPI. Matriks tersebut menunjukkan bahwa proyek-proyek kerjasama dengan LIPI juga selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan. Jika digunakan rencana aksi keanekaragaman hayati (lihat Bos 2) sebagai tolok ukur, proyek-proyek kerjasama LIPI ternyata juga selaras dengan rencana aksi keanekaragaman hayati Indonesia.

Hasil kajian ini hanya memberikan gambaran tentang keselarasan (relevansi) antara proyek JICA dengan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan. Namun demikian, kajian ini tidak memberikan kualitas (keeratan) keselarasan tersebut.

Tabel 5. Relevansi proyek-proyek JICA masa lalu dengan Rencana Strategis 2001-2005.

Program 2001-2005	JUDUL PROYEK (KATA KUNCI)								
	CFBTI	KOFCO	C Fixing	FFPMP	MIC	WKNP	GHSNP	RCB	CMBRC
1. Pemantapan kawasan hutan									
2. Perlindungan dan pengamanan hutan				x	x		x		
3. Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya hutan		x				x	x	x	x
4. Pengembangan pengelolaan hutan lestari			x		x				
5. Pengembangan kelembagaan kehutanan	x			x	x				

Catatan:

CFBTI – Center for Forest Biotechnology and Tree Improvement (Yogyakarta)

KOFCO - Komatsu – FORDA Fog Cooling system (Project for the Promotion of Mass Propagation Technique of Native Tree Species for Reforestation)

C Fixing – Carbon Fixing

FFPMP – Forest Fire Prevention and Management Project (Jambi, Kalimantan Barat)

MIC – Mangrove Information Center (and its related projects)

WKNP – Way Kambas National Park (rehabilitation)

GHSNP – Gunung Halimun-Salak National Park Management Project (Sukabumi)

RCB – Research Center for Biology (Cibinong)

CMBRC - Project on Improvement of Collection Management and Biodiversity Research Capacity of the Research Center for Biology, LIPI

Tabel 6. Relevansi proyek-proyek JICA masa lalu dengan Rencana Strategis 2005-2009.

PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA RENSTRA 2005-2009	JUDUL PROYEK (KATA KUNCI)								
	C Fixing	FFPMP	MIC	WKNP	GHSNP	RCB	CMBRC	Buffer.Z.	Mangr.
1. Program pematapan keamanan dalam negeri									
1.1. Pengamanan kawasan hutan									
2. Program pematapan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan									
2.1. Pengukuhan kawasan hutan									
2.2. Penyiapan dan evaluasi penggunaan dan perubahan kawasan hutan									
2.3. Pengelolaan hutan produksi alam yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan									
2.4. Pengembangan hutan tanaman									
2.5. Pengelolaan (pemanfaatan) hutan produksi alam									
2.6. Restrukturisasi industry primer									
2.7. Penertiban tata usana hasil hutan									
2.8. Penyusunan rencana kehutanan									
2.9. Pembangunan KPH									
2.10. Pengembangan manfaatn HHBK									
2.11. Pengembangan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi								X	
3. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam									
3.1. Pengelolaan taman nasional					X				
3.2. Pengelolaan KSA/PKA/TB		X			X				
3.3. Pengendalian kebakaran hutan		X							
3.4. Pengelolaan keanekaragaman hayati						X	X		
3.5. Pengelolaan hutan lindung									
3.6. Pemanfaatan produk TSL dan jasa lingkungan			X		X				
4. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam									
4.1. Pengembangan perbenihan		X	X	X	X			X	
4.2. Pengelolaan DAS					X				
4.3. Rehabilitasi hutan dan lahan			X	X	X				
4.4. Pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman									
4.5. Pengembangan RHL swadaya		X	X	X	X				X

PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA RENSTRA 2005-2009	JUDUL PROYEK (KATA KUNCI)								
	C Fixing	FFPMP	MIC	WKNP	GHSNP	RCB	CMBRC	Buffer.Z.	Mangr.
5. Program pengembangan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup									
5.1. Inventarisasi dan perpetaan sumberdaya hutan	x								
5.2. Pengembangan hutan kemasyarakatan		x			x				
6. Program pengembangan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup									
6.1. Pengembangan system informasi assessment pembangunan kehutanan									
7. Penelitian dan pengembangan									
7.1. Penelitian dan pengembangan kehutanan	x					x			
7.2. Sistem penunjang kelitbang dan penerapan hasil litbang kehutanan	x					x			
8. Pelatihan kehutanan									
8.1. Pengembangan diklat kehutanan		x	x						x
9. Tatakelola (governance)									
9.1. Pengembangan penyuluhan kehutanan									
9.2. Standarisasi produk dan jasa kehutanan									
9.3. Pembinaan hukum dan peraturan perundangan									
9.4. Desentralisasi kehutanan									
9.5. Pengembangan rencana dan penganggaran pembangunan kehutanan									
9.6. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kehutanan regional									
9.7. Pengembangan pengelolaan keuangan									
9.8. Pengembangan urusan umum									
9.9. Pengembangan informasi kehutanan									
9.10. Pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan									
9.11. Pengembangan kerjasama internasional dan perjanjian global bidang kehutanan									
9.12. Pengelolaan SDM kehutanan dan kesetaraan gender									
9.13. Penyelenggaraan pengawasan aparatur negara									

C Fixing – Carbon Fixing
FFPMP – Forest Fire Prevention and Management Project (Jambi)
MIC – Mangrove Information Center (and its related projects)
WKNP – Way Kambas National Park (rehabilitation)
GHSNP – Gunung Halimun-Salak National Park Management Project (Sukabumi)

RCB – Research Center for Biology (Cibinong)
CMBRC - Project on Improvement of Collection Management and Biodiversity
Research Capacity of the Research Center for Biology LIPI
Buffer Z: The Forest Fire Prevention by Initiative Forest Area Buffer Zone People
Project
Mangr : Sub-Sectoral Program of Mangrove

Tabel 7. Kontribusi proyek-proyek JICA masa lalu terhadap Rencana Strategis yang sedang berjalan.

PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA RENSTRA 2010-2014	JUDUL PROYEK (KATA KUNCI)								
	C Fixing	FFPMP	MIC	WKNP	GHSNP	RCB	CMBRC	Buffer.Z.	Mangr.
1. Perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan									
1.1. Penyusunan rencana makro kawasan hutan									
1.2. Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH)									
1.3. Pengukuhan kawasaan hutan									
1.4. Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan	+								
1.5. Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan									
1.6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Ditjen Planologi Kehutanan)									
1.7. Penyiapan pemantapan kawasan hutan									
2. Peningkatan usaha kehutanan									
2.1. Perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan hutan									
2.2. Peningkatan usaha hutan alam									
2.3. Peningkatan usaha hutan tanaman									
2.4. Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan									
2.5. Peningkatan usaha industri primer kehutanan									
2.6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Ditjen Bina Produksi Kehutanan)									
2.7. Pemantauan usaha kehutanan dan pembinaan tenaga teknis dan pengawas tenaga teknis PHPL									
3. Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan									
3.1. Pengembangan kawasan konservasi, ekosistem esensial dan pembinaan hutan lindung				+	+				
3.2. Pengembangan konservasi spesies dan genetik						+	+		
3.3. Penyidikan dan pengamanan hutan									
3.4. Pengendalian kebakaran hutan		+						+	
3.5. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan			+		+				+
3.6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Ditjen PHKA)									
3.7. Pengembangan dan pengelolaan taman nasional		+	+	+				+	+
3.8. Pengembangan pengelolaan konservasi sumberdaya alam			+			+	+		+

PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA RENSTRA 2010-2014	JUDUL PROYEK (KATA KUNCI)								
	C Fixing	FFPMP	MIC	WKNP	GHSNP	RCB	CMBRC	Buffer.Z.	Mangr.
4. Peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat									
4.1. Pengembangan perhutanan sosial		+							
4.2. Pengembangan perbenihan tanaman hutan			+	+					+
4.3. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS									
4.4. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan									
4.5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Ditjen BPDASPS)									
4.6. Perencanaan, penyelenggaraan RHL, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS									
4.7. Perencanaan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi hutan mangrove			+						
4.8. Penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan									
4.9. Pengembangan persuteraan alam									
5. Penelitian dan pengembangan kementerian kehutanan									
5.1. Penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi	+					+	+		
5.2. Penelitian dan pengembangan peningkatan produktivitas hutan									
5.3. Penelitian dan pengembangan keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan									
5.4. Penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan	+								
5.5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Badan Litbang Kehutanan)									
6. Penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan									
6.1. Pengembangan penyuluhan kehutanan			+		+				+
6.2. Peningkatan pelayanan penyuluhan kehutanan		+	+		+	+			+
6.3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemhut dan SDM kehutanan lainnya									
6.4. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan)									
7. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenhut									
7.1. Pengawasan terhadap kinerja, keuangan dan administrasi pada wilayah kerja Inspektorat I									

PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA RENSTRA 2010-2014	JUDUL PROYEK (KATA KUNCI)								
	C Fixing	FFPMP	MIC	WKNP	GHSNP	RCB	CMBRC	Buffer.Z.	Mangr.
7.2. Pengawasan terhadap kinerja, keuangan dan administrasi pada wilayah kerja Inspektorat II									
7.3. Pengawasan terhadap kinerja, keuangan dan administrasi pada wilayah kerja Inspektorat III									
7.4. Pengawasan terhadap kinerja, keuangan dan administrasi pada wilayah kerja Inspektorat IV									
7.5. Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN									
7.6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Irjen Kemhut)									
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kehutanan									
8.1. Koordinasi perencanaan dan evaluasi Kemhut									
8.2. Penyelenggaraan administrasi dan penataan kepegawaian Kementerian Kehutanan									
8.3. Penyelenggaraan dan pembinaan tata hukum dan organisasi Kementerian Kehutanan									
8.4. Penyelenggaraan administrasi keuangan Kemhut									
8.5. Penyelenggaraan ketatusahaan, kerumahtangaan dan pengelolaan perlengkapan Kemhut									
8.6. Pembinaan standardisasi, pengelolaan lingkungan dan penanganan perubahan iklim kehutanan									
8.7. Pembinaan dan koordinasi kerjasama luar negeri									
8.8. Penyiaran dan penyebarluasan informasi									
8.9. Pengelolaan keuangan, penyaluran dan pengembalian dana bergulir pembiayaan pembangunan kehutanan									
8.10 Pengendalian pembangunan kehutanan Regional I									
8.11. Pengendalian pembangunan kehutanan Regional II									
8.12. Pengendalian pembangunan kehutanan Reg. III									
8.13. Pengendalian pembangunan kehutanan Reg. IV									

C Fixing – Carbon Fixing

FFPMP – Forest Fire Prevention and Management Project (Jambi)

MIC – Mangrove Information Center (and its related projects)

WKNP – Way Kambas National Park (rehabilitation)

Buffer Z: The Forest Fire Prevention by Initiative Forest Area Buffer Zone People

RCB – Research Center for Biology (Cibinong)

GHSNP – Gunung Halimun-Salak National Park Management Project (Sukabumi)

Mangr : Sub-Sectoral Program of Mangrove

CMBRC - Project on Improvement of Collection Management and Biodiversity Research Capacity of the Research Center for Biology LIPI

VI. MASA DEPAN BANTUAN JEPANG DALAM BIDANG KEHUTANAN

PERAN BANTUAN JEPANG

Proyek-proyek yang didanai oleh Pemerintah Jepang telah memberikan berbagai macam peran kepada staf yang turut serta dalam proyek tersebut, kepada lembaga yang bekerjasama, serta kepada pembangunan kehutanan secara umum. Pada Tabel 7 disajikan ringkasan berbagai peran yang diberikan oleh proyek-proyek JICA, diidentifikasi dan dirumuskan dari wawancara dengan narasumber. Mengingat pentingnya peran bantuan Jepang ini, semua narasumber menyatakan bahwa bantuan Jepang sesungguhnya sangat berguna bagi Indonesia. Selain itu semua narasumber juga berharap agar Pemerintah Jepang akan tetap meneruskan bantuan kepada Indonesia, terutama melalui skema Bantuan Hibah.

Namun demikian, narasumber juga mengakui bahwa selama pelaksanaan proyek, beberapa perbedaan pandangan, kendala dan masalah tidak dapat dihindari. Agar tercipta lingkungan kerjasama pada proyek-proyek JICA yang sedang berjalan dan yang akan datang, permasalahan dan kendala perlu diidentifikasi dan ditanggulangi. Permasalahan, kendala dan rekomendasi akan disampaikan pada bagian selanjutnya.

Tabel 8. Peran proyek-proyek bidang kehutanan yang dibantu oleh Pemerintah Jepang.

No.	Peran	Keterangan	Contoh
1	Menyediakan <i>Provisioning</i>	Menyediakan berbagai sumberdaya untuk instansi mitra, termasuk gedung, fasilitas, peralatan, dan kendaraan dengan kualitas tinggi	Kompleks Cibinong, Kantor Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Stasiun Penelitian Cikaniki, Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
2	Mempercepat <i>Catalizing</i>	Mempercepat pelaksanaan program lembaga mitra (Kemhut atau LIPI) melalui penyediaan sumberdaya yang diperlukan, termasuk dana. Tanpa dana dari JICA, program akan diselesaikan lebih lama	Perumusan dan implementasi Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, pemindahan (relokasi) Herbarium Bogoriensis dari Bogor ke Cibinong
3	Melengkapi <i>Complementing</i>	Menyediakan sumberdaya komplemen (kelengkapan) agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik	Menyediakan fasilitas untuk Herbarium Bogoriensis (spesimen sudah dimiliki oleh LIPI, fasilitas untuk penyimpanan dan perawatan diberikan oleh JICA)
4	Memindahkan <i>Transferring</i>	Melakukan pemindahan (transfer) etos kerja keras, kerjasama internasional, pengetahuan, ketrampilan dan teknologi (terutama teknologi/ pengetahuan tingkat tinggi misalnya GIS, genetika molekuler)	Transfer teknologi: genetika molekuler pada Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, pemrosesan landsat image oleh staf PIKA

5	Memicu <i>Triggering</i>	Memicu atau mengundang proyek-proyek atau kegiatan lain yang serupa atau berbeda, setelah berakhirnya proyek JICA	Setelah berakhirnya proyek JICA, Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan membuat kerjasama dengan lembaga internasional lain (yaitu ACIAR)
6	Menemukan <i>Innovating</i>	Menemukan dan menciptakan pengetahuan, metoda, teknologi, system, unit organisasi yang baru	Penemuan jalur hijau terintegrasi yang tahan api, pembentukan Badan Pengelolaan Hutan Mangrove dan Manggala Agni
7	Meningkatkan <i>Enhancing</i>	Memberikan peluang kepada individu atau lembaga untuk meningkatkan kemampuan secara professional dan untuk menciptakan jejaring dengan individu dan/atau lembaga nasional/internasional lain	Beberapa counterpart Indonesia diberi kesempatan untuk melanjutkan studi ke universitas di Jepang, jejaring staf bertambah (kebanyakan dengan instansi atau individu Jepang)

PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK JICA: BEBERAPA FAKTA

Pada waktu dilakukan wawancara dengan narasumber, terungkap adanya perbedaan pandangan, permasalahan dan kendala selama pelaksanaan proyek. Pada dasarnya semua permasalahan dalam melaksanakan proyek tersebut berakar dari dua faktor yang mendasar: filosofi proyek dan sistem pendanaan (Tabel 8). Banyak masalah dan kendala lain terjadi (Tabel 9), namun masalah dan kendala tersebut dapat dikatakan minor. Agar penulisan dapat dilakukan secara sistematis, tahapan proyek dibuat sesuai dengan prosedur JICA yakni “Perencanaan, Pelaksanaan, Pengecekan, Pembelajaran” (“Plan, Do, Check, Action”).

Tabel 9. Perbedaan persepsi antara pihak Indonesia dan pihak Jepang dalam melaksanakan proyek-proyek JICA.

Topik	Persepsi Masing-Masing Pihak dan Rekomendasi
'Filosofi' proyek	<u>Pihak Jepang:</u> Bantuan Jepang hanya membantu pihak Indonesia untuk mencapai tujuan tertentu untuk melakukan pembangunan dalam bidang kehutanan. Oleh karenanya, Indonesia perlu menyediakan waktu, energi dan sumberdaya manusia yang cukup untuk proyek Indonesia sendiri.
	<u>Pihak Indonesia:</u> Proyek ini adalah proyek Jepang yang dilaksanakan di Indonesia. Mereka (pihak Jepang) memiliki target tertentu yang perlu dicapai. Kami (pihak Indonesia) hanya membantu pihak Jepang dalam melaksanakan proyek ini untuk mencapai tujuan mereka.
	<u>Rekomendasi:</u> Perbedaan pandangan dalam filosofi proyek perlu didiskusikan antar orang-orang yang terlibat dalam proyek (pihak Jepang dan pihak Indonesia) sebelum dilakukan

	perencanaan dan pelaksanaan proyek. Persamaan pandangan dan filosofi perlu dicapai sebelum proyek dimulai.
Sistem Pendanaan	<u>Pihak Jepang:</u> JICA tidak diperbolehkan untuk mendanai honorarium pihak Indonesia atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Mengingat bahwa proyek ini adalah proyek Indonesia, Kemhut perlu menyediakan dana yang mencukupi untuk melaksanakan proyek tersebut.
	<u>Pihak Indonesia:</u> Saat ini JICA seharusnya dapat memahami betapa sulitnya memperoleh pendanaan dari Kemhut untuk mendanai suatu proyek. Pada beberapa kasus, dana terlambat atau tidak mencukupi dan oleh karenanya Indonesia mengharapkan bantuan pendanaan Jepang.
	<u>Rekomendasi:</u> Mengingat bahwa pendanaan selalu menjadi topik yang terus menerus terjadi selama pelaksanaan proyek, kedua pihak (Indonesia dan Jepang) perlu mencapai kesepakatan tentang dana yang dapat disediakan oleh pihak lain. JICA direkomendasikan agar dapat lebih fleksibel dalam mengelola dana untuk proyek, sehingga – jika diperlukan – sebagian dana dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pihak Indonesia. Pemerintah Indonesia juga perlu memberikan pendanaan yang cukup.

Tabel 10. Ringkasan fakta yang terungkap berdasarkan wawancara dengan narasumber.

Tahap Perencanaan (“PLAN”)	
Peran Pemerintah Indonesia	Bappenas dan Kemhut seharusnya memiliki posisi yang kuat dalam menseleksi donor, proyek, lokasi dan seterusnya. Saat ini Pemerintah Indonesia dinilai terlalu ‘longgar’ dalam menentukan perjanjian sebelumnya. Pada masa mendatang diharapkan posisi Bappenas dan Kemhut dapat lebih kuat.
Tahap negosiasi	Beberapa tahapan negosiasi membutuhkan waktu lebih lama dari dugaan semula. Pada saat dilakukan negosiasi di Indonesia, negosiator JICA ternyata tidak dalam posisi untuk memutuskan hal-hal yang penting dan negosiator tersebut masih perlu konsultasi dengan kantor Tokyo.
Joint Coordinating Committee (JCC)	Anggota Joint Coordinating Committee(JCC) perlu melakukan rapat lebih sering. Saat ini anggota JCC melaksanakan rapat satu atau dua kali setahun. Frakuensi rapat yang terlalu rendah ini dapat menciptakan permasalahan jika proyek perlu menyesuaikan Project Development Matrix (PDM).
Pemilihan judul/tema	Tema dan judul proyek ditentukan sedemikian rupa agar selaras dengan Rencana Strategis Kemhut. Hingga saat ini semua proyek dinilai telah selaras dengan Rencana Strategis.
Sasaran proyek dan Rencana Strategis Kemhut	Semua proyek pada dasarnya telah mengikuti Rencana Strategis makro Kemhut. Namun demikian, Kemhut juga telah merumuskan Renstra untuk setiap Direktorat Jenderal. Dengan demikian JICA masih perlu mencek kembali proyek-proyek dengan Renstra pada tataran Direktorat Jenderal ini.
Perumusan PDM	Sesuai prosedur standard, PDM selalu dirumuskan terlebih dahulu sebelum memulai proyek yang baru. Beberapa PDM ternyata perlu diperbaiki pada

	waktu dilakukan review pertengahan (mid-term review). PDM untuk proyek kelanjutan biasanya sudah baik dan tidak perlu perbaikan.
Rencana pendanaan	Hampir semua counterpart Indonesia tidak tahu tentang jumlah dana yang disediakan oleh pihak Jepang. Beberapa proyek besar dapat menyediakan dana APBN yang cukup (co-funding). Dana dari pihak Indonesia kebanyakan dalam bentuk 'in kind'.
Tahapan Pelaksanaan ("DO")	
Koordinasi antara counterpart Jepang dan Indonesia	Kualitas koordinasi antara counterpart Jepang dan Indonesia sangat bervariasi. Beberapa proyek memiliki koordinasi yang amat baik, sementara beberapa lain proyek masih perlu peningkatan koordinasi.
Dana (co-funding) Kemhut/Pemerintah Indonesia	Berdasarkan dokumen perjanjian, Pemerintah Indonesia perlu menyediakan dana (co-funding) untuk proyek-proyek JICA. Namun demikian, tahun fiskal Pemerintah Indonesia berbeda dengan tahun fiskal Pemerintah Jepang. Tahun fiskal Pemerintah Indonesia berlangsung dari Januari ke Desember. Pada proyek JICA masa lalu, dana terlambat turun yakni pada bulan Juli atau Agustus. Keterlambatan dana ini tentu saja dapat menciptakan kendala dalam melaksanakan proyek.
Kualitas tenaga ahli Jepang	Kualitas tenaga ahli (expert) Jepang yang ditugaskan untuk proyek JICA sangat bervariasi. Beberapa expert memang sangat ahli dalam bidangnya (biasanya untuk proyek yang memerlukan ketrampilan atau latarbelakang khusus), beberapa expert masih perlu banyak belajar lagi.
Pelatihan untuk counterpart Indonesia	Banyak counterpart Indonesia diberi kesempatan untuk memperoleh pelatihan di Jepang dan bahkan di negara lain. Pelatihan ini sangat dihargai oleh counterpart Indonesia. Namun demikian, beberapa pelatihan tampaknya kurang efisien dan perlu lebih difokuskan kepada topik pelatihan yang sesuai.
Penyediaan peralatan	Banyak peralatan proyek yang disediakan langsung dari Jepang, Beberapa manual cara penggunaan alat tertulis dalam bahasa Jepang sehingga sulit dibaca oleh counterpart Indonesia.
Komunikasi	Masih terdapat kendala komunikasi, karena adanya perbedaan bahasa, kebiasaan, adat istiadat dan kebudayaan. Untuk proyek yang melibatkan penelitian, kendala komunikasi sangat minimal dan bahkan hampir tidak ada karena tenaga ahli/peneliti Jepang umumnya fasih berbahasa Inggris.
Counterpart – Pihak Indonesian	Hampir semua counterpart Indonesia tidak hanya ditugaskan untuk proyek JICA. Counterpart Indonesia ini diberi berbagai macam tugas lain, sehingga tidak dapat mendedikasikan diri untuk proyek JICA.
Counterpart – Pihak Jepang	Counterpart Jepang lebih berdedikasi kepada proyek karena counterpart Jepang dapat bekerja penuh waktu untuk proyek JICA.
Pelaporan	Pelaporan umumnya dikerjakan oleh counterpart Jepang, mengingat bahwa counterpart Indonesia tidak punya waktu yang cukup untuk proyek JICA.
Strategi exit	Proyek jangka panjang dan proyek kelanjutan memiliki strategi exit yang baik. Keberlanjutan proyek dapat dipertahankan jika strategi exit dapat direncanakan dengan baik.
Publikasi	Proyek yang terkait dengan penelitian, penyadartahuan dan pendidikan telah banyak menerbitkan makalah ilmiah, buku, manual, poster dan lain-lain.

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Pihak Indonesia dan Jepang dapat meningkatkan kemampuan kapasitas sumberdaya manusia selama melaksanakan proyek.
Data	Data penelitian sudah banyak terkumpul dan hingga kini banyak yang belum sempat dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional. Untuk data yang tidak terkait dengan penelitian, beberapa data tidak dapat ditemukan lagi karena pola kerja counterpart Indonesia yang kurang sistematis.
Evaluasi pertengahan dan akhir	Waktu yang tersedia untuk melakukan review terlalu pendek. Dalam waktu yang sangat pendek ini sangat sulit bagi evaluator untuk memahami dan mengevaluasi keseluruhan proyek (khususnya saat evaluasi akhir pada proyek-proyek besar).
Tahap Pengecekan ("CHECK")	
Monitoring (ex-post evaluation, ex-post monitoring)	JICA senantiasa melaksanakan monitoring secara sistematis. Proyek-proyek yang dianalisa terbukti memiliki dampak besar untuk pembangunan kehutanan dan sumberdaya manusia.
Dampak personal	Staf yang terlibat dalam proyek mengakui bahwa dampak personal dari proyek JICA sangat besar, memicu hubungan yang berkelanjutan dengan mantan mitra JICA. Setelah proyek berakhir, banyak mantan counterpart Indonesia yang berkerjasama dengan mantan mitra counterpart Jepang, baik dalam tema proyek/pekerjaan yang sama atau dalam tema lain.
Perlengkapan	After the project terminated, many equipments were managed by the Indonesian side. MoF need to have a special effort to manage the equipments. Equipments need for research were in good shape and well maintained.
Pembelajaran ("ACTION")	
Keunikan proyek JICA	Dibandingkan dengan Bantuan Luar Negeri yang serupa, bantuan Jepang melalui JICA memang agak unik, khususnya dalam hal standardisasi prosedur, penugasan counterpart Jepang dan transfer pengetahuan.
Perencanaan oleh Kemhut	Kemhut seharusnya memiliki rencana umum yang dapat diacu dan diharmonisasikan dengan proyek JICA (dan proyek dari negara lain).
Tantangan untuk Pemerintah Indonesia	Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan tata kelola (governance), kontrol dan monitoring, serta cara-cara untuk mengoptimalkan dana. Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu lebih kuat lagi dalam proses negosiasi untuk memulai suatu proyek.
Keberlanjutan proyek	Banyak faktor turut menentukan keberlanjutan proyek. Pemilihan lokasi dan strategi exit yang baik agaknya merupakan faktor yang sangat penting dalam keberlanjutan suatu proyek. Selain itu, perawatan (maintenance) setelah berakhirnya proyek juga menjadi faktor penting yang menentukan apakah proyek dapat dikatakan berlanjut atau tidak.

NICHE PROYEK-PROYEK JICA

Kemhut hingga saat ini telah menerima bantuan dari beberapa Bantuan Luar Negeri (BLN), termasuk dari EU, GTZ (Germany), KOICA (Korea), DFID (UK), USAID (US), AusAID (Australia), ITTO dan FAO. Setiap BLN sesungguhnya memiliki skema dan sistem masing-masing. Berdasarkan wawancara dengan narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 3 faktor yang membuat JICA unik dan berbeda dengan BLN lain. Ketiga faktor tersebut adalah:

a. Spirit Asia

Negara Jepang dan negara Indonesia adalah sama-sama negara Asia. Kedua negara ini memiliki latar belakang kebudayaan yang serupa, sehingga mempermudah kemitraan antar counterpart dan tenaga ahli/experts. Selain itu, counterpart Indonesia mengakui bahwa counterpart Jepang adalah pekerja yang ulet, konsisten, rajin dan terfokus kepada tugas mereka. Mengingat bahwa banyak staf Indonesia yang bekerja lebih 'fleksibel', pada waktu bekerja bersama counterpart Jepang, counterpart Indonesia dengan sendirinya harus mengimbangi kerja counterpart Jepang sehingga dapat tercipta spirit kerja yang lebih baik bagi counterpart Indonesia.

b. Penyediaan bantuan hibah

Banyak BLN lain yang memberikan bantuan hibah kepada Indonesia. Namun demikian, bantuan hibah dari Pemerintah Jepang agak berbeda dengan lainnya karena jumlahnya besar dan dari bantuan hibah tersebut dapat diperoleh gedung, fasilitas, peralatan dan kendaraan dengan kualitas sangat baik.

c. Transfer teknologi

Transfer teknologi dan ilmu pengetahuan terbaik yang diberikan oleh counterpart dan tenaga ahli Jepang adalah hal-hal yang terkait dengan pekerjaan laboratorium, khususnya teknologi tingkat tinggi yang belum dapat dilakukan oleh counterpart Indonesia, misalnya genetika molekuler dan GIS/remote sensing.

ARAHAN PROGRAM NASIONAL KEHUTANAN

Seperti telah disampaikan pada bagian terdahulu (Bab III), Kemhut telah merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pengembangan Jangka Panjang Kehutanan Indonesia 2006-2025 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 11. Visi dan misi Kementerian Kehutanan seperti tertuang dalam 'Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2006-2015'.

Visi	Kehutanan penyangga pembangunan berkelanjutan tahun 2025
Misi	a. Mewujudkan kelembagaan sektor kehutanan yang mantap
	b. Membangun dan meningkatkan produktifitas dan nilai SDAH yang berkelanjutan
	c. Mengembangkan produk barang dan jasa kehutanan yang ramah lingkungan, kompetitif, dan bernilai tambah tinggi
	d. Mengembangkan iklim usaha kehutanan yang kondusif
	e. Meningkatkan ekspor barang dan jasa kehutanan
	f. Meningkatkan kesejahteraan dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan yang adil dan bertanggung jawab

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh para narasumber, arah program kehutanan untuk masa mendatang akan berkaitan dengan 3 tema payung: (1) perubahan iklim, (2) konservasi dan (3) jasa lingkungan. Agar tema-tema ini dapat dilaksanakan dengan baik, Kemhut secara internal masih perlu melakukan perbaikan dalam hal: (a) tata kelola/governance dan (b) pengembangan sumberdaya manusia.

Perubahan iklim dan topik yang terkait (REDD++, perdagangan karbon) dapat dikategorikan sebagai isu baru (*new and emerging issue*). Sewaktu Kemhut merumuskan rencana pembangunan jangka panjang pada tahun 2006, perubahan iklim masih belum menjadi topik penting. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa topik yang terkait dengan perubahan iklim secara eksplisit tidak tercantum dalam misi Kemhut. Namun demikian, perubahan iklim ini sudah dimasukkan dalam Rencana Strategis 2010-2014. Isu baru lain dalam bidang konservasi adalah restorasi ekosistem, yang dapat pula dikaitkan dengan isu perubahan iklim.

ARAHAN PROGRAM JICA UNTUK MASA MENDATANG

Pada masa mendatang, program global, proyek dan kegiatan dalam bidang kehutanan akan banyak dikaitkan dengan perubahan iklim. Sebagai contoh, penanaman pohon dapat dianggap sebagai REDD dan *carbon sequestration*; sementara inventarisasi hutan dapat dianggap sebagai kegiatan pendugaan karbon.

Dengan mengasumsikan bahwa tema JICA untuk masa mendatang akan serupa dengan tema masa lalu, pada Tabel 11 disampaikan beberapa saran topik untuk proyek-proyek JICA masa mendatang berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah disajikan pada bagian terdahulu. Untuk seleksi lokasi, banyak narasumber yang menyarankan bahwa lebih baik JICA bekerja pada lokasi di mana JICA pernah

bekerja pada masa lampau. Jika JICA memulai proyek baru di lokasi yang sama sekali baru, maka akan diperlukan waktu tambahan untuk persiapan dan pra-kondisi.

Tabel 12. Beberapa saran arahan proyek-proyek JICA masa mendatang.

Tema Payung	Contoh Topik
Perubahan iklim	Mekanisme dan tata kelola REDD++, penghitungan karbon, mitigasi dan adaptasi; system MRV (Measuring, Reporting and Verification); topik terkait kebocoran karbon (kebakaran hutan, penebangan hutan illegal, penyerobotan lahan), ide-ide lain yang kreatif-inovatif, mekanisme dan teknik dengan tema perubahan iklim
Tema terkait manusia dalam bidang kehutanan	Sistem agroforestri, peningkatan sumberdaya manusia, kegiatan meningkatkan pendapatan, pengelolaan daerah penyangga, kampanye dan penyadartahuan, penelitian dan pengembangan
Konservasi	Restorasi ekosistem, konservasi ekosistem/lanskap, konservasi spesies langka, konservasi tanah dan air
Pengelolaan taman nasional dan kawasan dilindungi	Pengelolaan taman nasioal dan kawasan konservasi lain, inisiatif baru (misal Inisiatif Satoyama), pengembangan taman nasional model
Jasa lingkungan	Pembayaran jasa lingkungan (<i>payment for environmental service</i>), valuasi ekonomi terhadap keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan lain, ekowisata
Tata kelola (governance)	Penguatan KPH, tata kelola terkait perdagangan karbon
Efisiensi dan produksi kayu	Peningkatan kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari dalam mengelola berbagai tipe hutan, pengembangan hasil hutan non-kayu, efisiensi pemanfaatan kayu, penanaman spesies kurang dikenal

VII. PENUTUP

Bantuan Jepang dalam bidang kehutanan telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1970an. Berbagai proyek dengan lima skema telah dilakukan dengan baik. Dari proyek-proyek yang dikaji pada studi ini, luaran (*output*) dan dampak (*impact*) dinilai sangat besar dan sesuai dengan kebijakan kehutanan.

Kajian ini membuktikan bahwa proyek JICA yang telah dilaksanakan mendukung hampir semua kebijakan Kementerian Kehutanan, termasuk kebijakan yang terkait dengan konservasi, rehabilitasi, kebakaran hutan, dan pembangunan masyarakat. Namun demikian, ada beberapa topik tertentu yang memang tidak dapat dilaksanakan dan didukung oleh JICA, misalnya topik tentang pembalakan liar dan pemantapan kawasan hutan.

Berdasarkan kajian tentang peluang kontribusi JICA terhadap Renstra Kemhut yang sedang berjalan (2010-2014), dapat disimpulkan bahwa proyek JICA dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap program Kemhut yang terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai berbasis pembangunan masyarakat, penelitian dan pengembangan dalam bidang kehutanan, serta penyuluhan kehutanan dan pengembangan SDM dalam bidang kehutanan. Namun demikian, kajian ini tidak dimaksudkan untuk dipadukan dengan situasi politik. Pertanyaan apakah bantuan Pemerintah Jepang ada kaitannya dengan tujuan-tujuan tertentu, misalnya, tidak termasuk dalam ruang lingkup tujuan studi ini.

Pada waktu melakukan wawancara, fakta-fakta yang terjadi di lapangan dapat terungkap. Wawancara dengan banyak narasumber membuktikan bahwa sesungguhnya pengetahuan kolektif (*collective knowledge*) sudah banyak terhimpun, tersimpan pada diri para narasumber.

Bantuan Jepang untuk bidang kehutanan di Indonesia telah berlangsung selama setidaknya empat dekade. Walau beberapa proyek mengalami kendala di sana-sini, dapat dikatakan bahwa semua proyek JICA dapat dilaksanakan dengan baik. Kini tergantung Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan bantuan ini dengan cara seoptimal mungkin guna menunjang pembangunan kehutanan Indonesia.

REFERENSI

- Bappenas. 2003. Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2003-2020: National Document. Bappenas. Jakarta.
- Bappenas 1993. Biodiversity Action Plan for Indonesia. Bappenas. Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 2001. Rencana Strategis 2001-2005. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- JICA. 2009. JICA's Annual Report 2009. Downloaded on August 1 from <http://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2009/pdf/08.pdf>
- Kementerian Kehutanan. 2010. Rencana Strategis 2010-2014. Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Ministry of Forestry. 2006a. Indonesia's Forestry Long Term Development Plan 2006-2025. Ministry of Forestry. Jakarta.
- Ministry of Forestry. 2006b. Strategic Plan of the Ministry of Forestry 2005-2009 (Revised). Ministry of Forestry. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar proyek-proyek JICA masa lalu dalam bidang kehutanan yang dikaji pada studi ini.

No.	NAMA PROYEK	KETERSEDIAAN DOKUMEN
A. Technical Cooperation (Kerjasama Teknik)		
1	Mountain Logging in Java	Dokumen tersedia, judul sedikit berbeda: "Mountain Logging Practice in Java"
2	The Trial Plantation Project in Benakat, South Sumatra	Dokumen tersedia
3	Tropical Rainforest Research Project	Dokumen tersedia
4	The Watershed Management Technology Development Project in South Sulawesi	Dokumen tidak tersedia
5	Forest Tree Improvement Project	Dokumen tersedia
6	The Development of the Sustainable Mangrove Management Project	Dokumen tersedia
7	Forest Fire Prevention Management Project	Dokumen tersedia
8	Carbon Fixing Forest Management Project	Dokumen tersedia
9	The Mangrove Information Center Project	Dokumen tersedia
10	Project for the Promotion of Mass Propagation Technique of Native Tree Species for Reforestation	Dokumen tersedia
11	The Forest Fire Prevention by Initiative Forest Area Buffer Zone People Project	Dokumen tersedia
12	Sub-Sectoral Program of Mangrove	Dokumen tersedia
13	Gunung Halimun-Salak National Park Management Project	Dokumen tersedia
14	Biodiversity Conservation Project	Dokumen tersedia
15	Project on Improvement of Collection Management and Biodiversity Research Capacity of the Research Center for Biology, Indonesian Institute of Sciences in Indonesia	Dokumen tersedia
B. Development Study (Studi Pengembangan)		
1	Study on Forest Resources in Pekalongan Central Jawa	Dokumen tidak tersedia
2	Development Study on Afforestation in Benakat South Sumatera	Dokumen tersedia
3	Study on Forest Resources in the Upper Musi South Sumatera	Dokumen tersedia
4	Marunda Timber Distribution Complex	Tersedia dokumen dengan judul serupa ("Economic Feasibility Study & Detailed Engineering Design Proyek Pusat Perakayuan Marunda")

5	Utilization of Unused Tree Species	Dokumen tersedia, judul sedikit berbeda: "Utilization of Lesser Known Tree Species"
6	The Feasibility Study on Upland Plantation and Land Development Project at Citarik Sub-Watershed in the Republic of Indonesia	Dokumen tersedia
7	The Development Study on Land Rehabilitation of Semi Arid Zone in East Nusa Tenggara	Dokumen tersedia
8	Social Forestry Development in the Upper Musi	Tersedia dokumen dengan judul serupa ("The Feasibility Study on Social Forestry Development Project in the Upper Musi Watershed in Indonesia")
9	The Study on Critical Land and Protection Forest Rehabilitation at Tondano Watershed in the Republic of Indonesia	Dokumen tidak tersedia
10	Study on Watershed Management in the Upper Musi, South Sumatera	Dokumen tersedia
11	Industrial Plantation Project	Dokumen tersedia
12	Soil Erosion Control in South Sulawesi	Dokumen tidak tersedia
C. Grant Aid (Bantuan Hibah)		
1	Tropical Rainforest Research Center (Mulawarman University)	Dokumen tersedia
2	Trial Plantation Training Center in Benakat South Sumatera	Dokumen tersedia
3	Project for Afforestation Machinery Provision	Dokumen tidak tersedia
4	Expansion of Tropical Rainforest Research Center	Dokumen tidak tersedia
5	Project for the Improvement of the Equipment for the Afforestation in East Kalimantan	Dokumen tidak tersedia
6	Forest Tree Improvement Center Construction	Tersedia dokumen dengan judul serupa ("Basic Design Study Report on the Project for Establishment of the Forest Tree Improvement Development Center in the Republic of Indonesia")
7	Rehabilitation of the Degraded National Park by Forest Fire	Dokumen tersedia
8	Rehabilitation of Natural Forest in Way Kambas National Park	Dokumen tersedia
9	Improvement of Forest Fire Equipment	Dokumen tersedia
10	The Project for Improvement of Research Facilities for Biodiversity Conservation and Utilization	Dokumen tersedia

D. Loan Assistance (Dana Pinjaman)		
1	Engineering Services for Central Sumatra forest rehabilitation	Dokumen tidak tersedia
2	Upland Plantation and Land Development Project at Citarik Sub-Watershed	Dokumen tersedia; lembaga pelaksana adalah Departemen Pekerjaan Umum
3	The Feasibility Study on the Urgent Bali Beach Conservation Project	Dokumen tersedia; lembaga pelaksana adalah Departemen Pekerjaan Umum
E. Development Cooperation (Kerjasama Pengembangan)		
1	Forestry Development Study in Balikpapan	Dokumen tidak tersedia
2	Experimental Afforestation in Balikpapan	Dokumen tidak tersedia
3	Forestry Development Study in Pulau	Dokumen tidak tersedia
4	Experimental Afforestation in Malino	Dokumen tidak tersedia
5	Experimental Afforestation in Tarakan	Dokumen tidak tersedia
6	Experimental Afforestation in Monggali	Dokumen tidak tersedia
7	Experimental Afforestation in North Sumatera	Dokumen tidak tersedia
8	Forestry Development Study in Kacingan	Dokumen tidak tersedia
9	Forestry Development Study in Patigo	Dokumen tidak tersedia
10	Forestry Development Study in Togean	Dokumen tersedia
11	Experimental Afforestation in Togean	Dokumen tidak tersedia
12	Development Study on Unused Tree Species in Togean	Dokumen tidak tersedia
13	Large-Scale Refforestation Technique	Dokumen tidak tersedia
14	Experimental Afforestation in East Java Province	Dokumen tidak tersedia
15	Development Study on Unused Tree Species in Pare	Dokumen tidak tersedia
16	Development Study on Carbon Fixation in Indonesia	Dokumen tersedia
17	Forestry Development Study in Probolinggo	Dokumen tidak tersedia
18	Forestry Development Study in Taliabu	Dokumen tidak tersedia
19	Forestry Development Study in Sumangus	Dokumen tidak tersedia

Lampiran 2. Ringkasan proyek-proyek JICA masa lalu, disusun berdasarkan urutan kronologis.

No.	NAMA PROYEK	PERIODE PROYEK	SKEMA PROYEK*	LOKASI	MITRA UTAMA
1	Experimental Afforestation in Balikpapan	1974	KP	Balikpapan (Kalimantan Tiimur)	Kementerian Kehutanan
2	Forestry Development Study in Pulau	1974	KP	Data tidak tersedia	Kementerian Kehutanan
3	Experimental Afforestation in Malino	1974	KP	Data tidak tersedia	Kementerian Kehutanan
4	Experimental Afforestation in Tarakan	1975	KP	Tarakan (East Kalimantan)	Kementerian Kehutanan
5	Experimental Afforestation in Monggali	1975	KP	Data tidak tersedia	Kementerian Kehutanan
6	Experimental Afforestation in North Sumatera	1975	KP	Sumatera Utara	Kementerian Kehutanan
7	Forestry Development Study in Kacingan	1976	KP	Data tidak tersedia	Kementerian Kehutanan
8	Study on Forest Resources in Pekalongan, Central Jawa	1976-1977	SP	Pekalongan (Jawa Tengah)	Kementerian Kehutanan
9	Soil Erosion Control in South Sulawesi	1977?	SP	Sulawesi Selatan	Kementerian Kehutanan
10	Forestry Development Study in Patigo	1977	KP	Data tidak tersedia	Kementerian Kehutanan
11	Forestry Development Study in Balikpapan	1977-1982	KP	Balikpapan (Kalimantan Timur)	Kementerian Kehutanan
12	Forestry Development Study in Probolinggo	?	KP	Probolinggo (Jawa Tengah)	Kementerian Kehutanan
13	Forestry Development Study in Taliabu	?	KP	Sulawesi	Kementerian Kehutanan
14	Forestry Development Study in Sumangus	?	KP	Data tidak tersedia	Kementerian Kehutanan
15	Mountain Logging Practice in Java	1977-1982	KT	Jawa Tengah dan Timur	Kementerian Kehutanan
16	Study on Forest Resources in the Upper Musi, South Sumatera	1977-1979	SP	Sumatera Selatan	Kementerian Kehutanan
17	Study on Watershed Management in the Upper Musi, South Sumatera	1979-1980	SP	Sumatera Selatan	Kementerian Kehutanan
18	Social Forestry Development in the Upper Musi	1979-1980	SP	South Sumatra	Kementerian Kehutanan
19	Forestry Development Study in Togeang	1978	KP	Togean (Sulawesi)	Kementerian Kehutanan
20	Experimental Afforestation in Togeang	1978	KP	Togean (Sulawesi)	Kementerian Kehutanan

21	Development Study on Unused Tree Species in Togeon	1978	KP	Togeon (Sulawesi)	Kementerian Kehutanan
22	Marunda Timber Distribution Complex	1980	SP	Jakarta	Pemerintah DKI Jakarta
23	Utilization of Unused Tree Species	1980	SP	Data tidak tersedia	Kementerian Kehutanan
24	Development Study on Afforestation in Benakat South Sumatera	1977-1979	SP	Benakat (Sumatera Selatan)	Kementerian Kehutanan
25	The Trial Plantation Project in Benakat, South Sumatra	1979-1995	KT	Benakat (Sumatera Selatan)	Kementerian Kehutanan
26	Trial Plantation Training Center in Benakat South Sumatera	1980	BH	Benakat (Sumatera Selatan)	Kementerian Kehutanan
27	Project for Afforestation Machinery Provision	1985-1986	BH	Benakat (Sumatera Selatan)	Kementerian Kehutanan
28	Industrial Plantation Project	1988-1990	BH	Benakat (Sumatera Selatan)	Kementerian Kehutanan
29	Large-Scale Refforestation Technique	1989-1992	KP	Data tidak tersedia	Kementerian Kehutanan
30	Tropical Rainforest Research Center (Mulawarman University)	1979	BH	Samarinda	Kementerian Kehutanan
31	Tropical Rainforest Research Project (Phase I, II, III)	1985-1999	KT	Samarinda	Kementerian Kehutanan, Kementerian Pendidikan
32	Expansion of Tropical Rainforest Research Center	1986	BH	Samarinda	Kementerian Kehutanan, Kementerian Pendidikan
33	Project for the Improvement of the Equipment for the Afforestation in East Kalimantan	1988-1989	BH	Samarinda	Kementerian Kehutanan
34	The Watershed Management Technology Development Project in South Sulawesi	1988-2002	KT	Sulawesi Selatan	Kementerian Kehutanan
35	The Feasibility Study on Upland Plantation and Land Development Project at Citarik Sub-Watershed in the Republic of Indonesia	1991-1993	SP	Citarik (Jawa Barat)	Kementerian Kehutanan
36	The Development Study on Land Rehabilitation of Semi Arid Zone in East Nusa Tenggara (Phase I, II)	1993-1995, 1995-1996	SP	Nusa Tenggara Timur	Kementerian Kehutanan
37	Experimental Afforestation in East Java Province	1994	KP	Jawa Timur	Kementerian Kehutanan

38	Development Study on Unused Tree Species in Pare	1994	KP	Pare (Sulawesi)	Kementerian Kehutanan
39	The Study on Critical Land and Protection Forest Rehabilitation at Tondano Watershed in the Republic of Indonesia	1999-2001	SP	Tondano (Sulawesi)	Kementerian Kehutanan
40	Forest Tree Improvement Center Construction	1989-1992	BH	Yogyakarta	Kementerian Kehutanan
41	Forest Tree Improvement Project (Phase I, II)	1992-1997; 1997-2002	KT	Yogyakarta	Kementerian Kehutanan
42	The Development of the Sustainable Mangrove Management Project	1992-1999	KT	Sanur (Bali)	Kementerian Kehutanan
43	The Mangrove Information Center Project	2001-2006	KT	Sanur (Bali)	Kementerian Kehutanan
44	Sub-Sectoral Program of Mangrove	2007-2010	KT	Sanur (Bali)	Kementerian Kehutanan
45	Carbon Fixing Forest Management Project	2001-2006	KT	Bogor	Kementerian Kehutanan
46	Development Study on Carbon Fixation in Indonesia	2001	KP	Bogor	Kementerian Kehutanan
47	Project for the Promotion of Mass Propagation Technique of Native Tree Species for Reforestation	2004-2007	KT	Bogor	Kementerian Kehutanan
48	Forest Fire Prevention Management Project	1996-2001; 2001-2006	KT	Jambi, Riau, Berbak, Kalimantan Barat	Kementerian Kehutanan
49	The Forest Fire Prevention by Initiative Forest Area Buffer Zone People Project	2006-2009	KT	Jambi	Kementerian Kehutanan
50	Rehabilitation of the Degraded National Park by Forest Fire	1999-2002	BH	Taman Nasional Way Kambas	Kementerian Kehutanan
51	Improvement of Forest Fire Equipment	2001	BH	TN Bukit Tigapuluh, TN Berbak, TN Way Kambas, TN Gunung Palung	Kementerian Kehutanan
52	Rehabilitation of Natural Forest in Way Kambas National Park	1999-2004	BH	TN Way Kambas (Lampung)	Kementerian Kehutanan (TN Way Kambas)
53	Biodiversity Conservation Project	1995-2003	KT	Sukabumi, Bogor, Cibinong	Kementerian Kehutanan, LIPI

54	Gunung Halimun-Salak National Park Management Project	2003-2008	KT	Sukabumi	Kementerian Kehutanan (TN Gunung Halimun-Salak)
55	The Project for Improvement of Research Facilities for Biodiversity Conservation and Utilization	2004, 2005, 2006	BH	Cibinong (Jawa Barat)	LIPI
56	Project on Improvement of Collection Management and Biodiversity Research Capacity of the Research Center for Biology, Indonesian Institute of Sciences in Indonesia	2007	KT	Cibinong (Jawa Barat)	
Dana Pinjaman					
57	Engineering Services for Central Sumatra forest rehabilitation	1992	DP	Sumatera bagian tengah	Direktorat Jenderal Pengembangan Sumberdaya Air – Kementerian Pekerjaan Umum
58	Upland Plantation and Land Development Project at Citarik Sub-Watershed	1995	DP	Citarik (Jawa Barat)	
59	The Feasibility Study on the Urgent Bali Beach Conservation Project	1996	DP	Bali	

*Catatan:

KT: Kerjasama Teknik

BH: Bantuan Hibah

DP: Dana Pinjaman

SP: Studi Pengembangan

KP: Kerjasama Pengembangan

Lampiran 3. Daftar narasumber yang diwawancarai.

Peran atau Judul Proyek	No	Nama
Penentu Kebijakan	1	Bp. Basah Hernowo (Bappenas)
	2	Prof. Endang Sukara (LIPI)
	3	Dr. Tonny Soehartono (Kemhut)
	4	Dr. I.B. Putera Parthama (Litbang Kehutanan)
	5	Bp. Yuyu Rahayu
Peneliti yang terlibat dalam proyek lain (non-JICA)	6	Bp. Tajudin Edy Komar (ITTO)
<ul style="list-style-type: none"> • The Development of the Sustainable Mangrove Management Project • The Mangrove Information Center Project • Sub-Sectoral Program of Mangrove 	7	Bp. Hiroyuki Hatori
	8	Ibu Ni Wayan Wiratini
	9	Ibu Oktovina Trisia Windarti
	10	Bp. Arief Mahmud
<ul style="list-style-type: none"> • Biodiversity Conservation Project 	11	Bp. Sasmito
	12	Dr. Sih Kahono
	13	Dr. Dewi Malia Prawiradilaga
	14	Bp. Hiroshi Kobayashi
<ul style="list-style-type: none"> • Gunung Halimun Salak National Park Management Project 	15	Bp. Agoes Sriyanto
	16	Dr. Bambang Supriyanto
	17	Bp. Kuswandono
	18	Bp. Isamu Kuboki
	19	Bp. Shigeru Ono
<ul style="list-style-type: none"> • Forest Fire Prevention Management Project 	20	Bp. Adi Susmianto
	21	Bp. Sudarmaji
	22	Dr. Bambang Hero Saharjo
	23	Bp. Bambang Sumantri
<ul style="list-style-type: none"> • Carbon Fixing Forest Management Project 	24	Bp. Halasan Tulus
	25	Bp. Waladi Isnani
<ul style="list-style-type: none"> • Tree Improvement Project 	26	Prof. Lilik Budi Prasetyo
	27	Dr. Chairil Anwar Siregar
<ul style="list-style-type: none"> • The Trial Plantation Project in Benakat, South Sumatra 	28	Dr. Rufi'i
	29	Bp. Didik Purwito
	30	Dr. Anto Rimbawanto

Lampiran 4. Daftar narasumber yang diwawancarai selama kunjungan lapangan.

Judul Proyek	No	Nama Narasumber	Peran pada Proyek
<ul style="list-style-type: none"> Gunung Halimun-Salak National Park Management Project 	1	<ul style="list-style-type: none"> Istanto 	Kepala Balai Taman Nasional; kini melaksanakan rencana pengelolaan yang dihasilkan dari proyek
	2	<ul style="list-style-type: none"> Desy Ekawati 	Pengendali Ekosistem Hutan
	3	<ul style="list-style-type: none"> Nur Faizin 	Kaur Program Perencanaan
	4	<ul style="list-style-type: none"> Momo Suparmo 	Interpreter di Pusat Penelitian Cikaniki
	5	<ul style="list-style-type: none"> Cecep 	Staf lapangan
	6	<ul style="list-style-type: none"> Ibrahim 	Kepala Resort Sukagalih
	7	<ul style="list-style-type: none"> Soma 	Ketua Kelompok Pelestarian Lingkungan Hidup, Kampung Sukagalih
	8	<ul style="list-style-type: none"> Rokib 	Jubir Kelompok Pelestarian Lingkungan Hidup, Kampung Sukagalih
	9	<ul style="list-style-type: none"> Jaja 	Komando Polisi Hutan
	10	<ul style="list-style-type: none"> Apud 	Staf Pusat Penelitian Cikaniki
	11	<ul style="list-style-type: none"> Amin 	Staf Pusat Penelitian Cikaniki
	12	<ul style="list-style-type: none"> Odi 	Staf Pusat Penelitian Cikaniki
<ul style="list-style-type: none"> Biodiversity Conservation Project Improvement of Research Facilities for Biodiversity Conservation and Utilization Project on Improvement of Collection Management and Biodiversity Research Capacity of the Research Center for Biology, Indonesian Institute of Sciences in Indonesia 	13	<ul style="list-style-type: none"> M. Jauhar Arif ('Memet') 	Kepala Divisi Zoologi, Puslit Biologi, LIPI
	14	<ul style="list-style-type: none"> Dr. Ahmad Dinoto 	Staf Puslit Biologi, LIPI
	15	<ul style="list-style-type: none"> Uway Warsita 	Staf Puslit Biologi, LIPI
	16	<ul style="list-style-type: none"> Dr. Rullyana Susanti 	Staf Puslit Biologi, LIPI
	17	<ul style="list-style-type: none"> Sudaryanti 	Staf Puslit Biologi, LIPI
	18	<ul style="list-style-type: none"> Rini 	Staf Puslit Biologi, LIPI
	19	<ul style="list-style-type: none"> Sudaryono 	Staf Puslit Biologi, LIPI
	20	<ul style="list-style-type: none"> Eko Baroto Waluyo 	Kepala Divisi Botani, Puslit Biologi, LIPI

<ul style="list-style-type: none"> • Forest Tree Improvement Center Construction • Forest Tree Improvement Project 	21	• Dr. Rufi'i	Kepala Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPBPTH)
	22	• Dr. Anto Rimbawanto	Peneliti BBPBPTH
	23	• M. Kharomaini	Peneliti BBPBPTH
	24	• Tri Pambudi	Peneliti BBPBPTH
	25	• Riharto	Peneliti BBPBPTH
<ul style="list-style-type: none"> • Forest Fire Prevention Management Project • Improvement of Forest Fire Equipment • The Forest Fire Prevention by Initiative Forest Area Buffer Zone People Project 	26	• Tri Siswo Raharjo	Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jambi
	27	• Halasan Tulus	Kepala Taman Nasional Bukit Tigapuluh National Park
	28	• Madari	Staf Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jambi
	29	• Seto Sudarmono	Staf Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jambi
	30	• Aziz Sembiring	Staf Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jambi
	31	• Muh. Amin	Kepala Desa Sungai Rambut
	32	• Ibram Edy	Staf Taman Nasional Bukit Tigapuluh
	33	• Sugito	Petani
	34	• Andi Munandar	Staf Taman Nasional Bukit Tigapuluh
	35	• Putu	Staf Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jambi